



BADAN POM

LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2015



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI DENPASAR



SAMBUTAN
KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI DENPASAR

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pengganti atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap instansi untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah media pertanggung jawaban yang berisi informasi mengenai kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai Instansi Pemerintah Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai Besar POM) di Denpasar tahun 2015 ini menyusun LAKIP sebagai bentuk pengejawantahan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Balai Besar POM di Denpasar. Penyampaian informasi kinerja melalui LAKIP ini disamping merupakan sarana bagi Balai Besar POM di Denpasar untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pihak terkait (*stakeholders*), juga merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar sebagai upaya meningkatkan kinerja di masa mendatang.

LAKIP tahun 2015 ini secara garis besar memberikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja Balai Besar POM di Denpasar pada tahun 2015. Rencana Kinerja tahun 2015 yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja tahun 2015 merupakan sasaran kinerja yang ingin dicapai selama tahun 2015 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Balai Besar POM di Denpasar. Sementara itu, capaian kinerja yang didapat dari Pengukuran Kinerja merupakan realisasi seluruh kegiatan selama tahun 2015 yang diarahkan bagi pemenuhan target yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja tahun 2015.

Tahun 2015 merupakan tahun pertama (awal) pelaksanaan Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar tahun 2015-2019, yang merupakan periode pertama RPJMN 2015-2019 sehingga untuk LAKIP pada tahun ini lebih menekankan pada evaluasi capaian. Dalam tahun 2015 ini Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar telah menetapkan kegiatan-kegiatan strategis yang mengarah kepada pencapaian target sasaran tahunan yang telah ditetapkan dalam rangka mengantisipasi permasalahan pengawasan obat dan makanan dengan mengacu

kepada target lima tahun yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Balai Besar POM di Denpasar tahun 2015 – 2019.

Hasil evaluasi kinerja dalam LAKIP ini, baik capaian kinerja yang memenuhi maupun yang tidak memenuhi target sasaran akan dikaji lebih lanjut sebagai upaya mengidentifikasi upaya perbaikan kinerja yang dapat dilakukan pada tahun-tahun berikutnya. Informasi kinerja yang ada sepenuhnya akan dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar dalam upaya pemenuhan sasaran-sasaran yang telah dicanangkan dalam Rencana Strategis Balai Besar POM di Denpasar.

Disadari bahwa tugas dan tanggung jawab pengawasan yang diemban oleh Balai Besar POM di Denpasar sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM akan semakin luas dan kompleks. Untuk melakukan pengawasan obat dan makanan dengan ruang lingkup yang semakin luas tersebut, Balai Besar POM di Denpasar tidak mungkin melaksanakannya sendiri dan sangat membutuhkan kerjasama dengan instansi terkait baik dengan Instansi Vertikal maupun Instansi Pemerintah Daerah terutama untuk mensinergikan program/kegiatan masing-masing sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya.

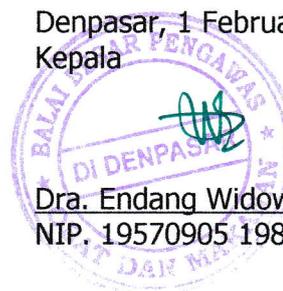
Disamping itu, peranan masyarakat sebagai konsumen dalam pengawasan obat dan makanan sangatlah penting. Masyarakat adalah penentu akhir apakah suatu produk akan dikonsumsi atau tidak. Oleh karena itu pemberdayaan masyarakat adalah menjadi sangat menentukan dalam keberhasilan pencapaian kinerja Balai Besar POM di Denpasar.

Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materiil dalam pencapaian kinerja Balai Besar POM di Denpasar. Terima kasih juga disampaikan kepada tim penyusun LAKIP Balai Besar POM di Denpasar tahun 2015 yang telah merampungkan laporan ini tepat pada waktunya.

Akhirnya, kami berharap agar Laporan ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta dapat memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan kinerja Balai Besar POM di Denpasar.

Denpasar, 1 Februari 2015

Kepala



Dra. Endang Widowati, Apt.

NIP. 19570905 198903 2 001

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMBUTAN KEPALA BALAI BESAR POM DI DENPASAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF	1
BAB I PENDAHULUAN	5
A. GAMBARAN UMUM INSTITUSI.....	5
B. STRUKTUR ORGANISASI.....	10
C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI	11
D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI	14
E. ISU STRATEGIS.....	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	18
A. RENCANA STRATEGIS.....	18
B. PERJANJIAN KINERJA.....	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	27
A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA	29
B. REALISASI ANGGARAN.....	62
BAB IV PENUTUP	65

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1a** PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
- LAMPIRAN 1b** RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
- LAMPIRAN 2** PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2015
- LAMPIRAN 3** PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN/PROGRAM TAHUN 2015
- LAMPIRAN 4** PENGUKURAN EFISIENSI KEGIATAN TAHUN 2015
- LAMPIRAN 5.1** PERSENTASE OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT
- LAMPIRAN 5.2** TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT
- LAMPIRAN 5.3** JUMLAH SAMPEL YANG DIUJI DENGAN PARAMATER KRITIS
- LAMPIRAN 5.4** PEMENUHAN TARGET SAMPLING PRODUK OBATDI SEKTOR PUBLIK
- LAMPIRAN 5.5** CAKUPAN PENGAWASAN SARANA DISTRIBUSI DAN PRODUKSI
- LAMPIRAN 5.6** JUMLAH PERKARA DI BIDANG OBAT DAN MAKANAN
- LAMPIRAN 5.7** JUMLAH LAYANAN PUBLIK
- LAMPIRAN 5.8** KOMUNITAS YANG DIBERDAYAKAN
- LAMPIRAN 5.9** PEMENUHAN JUMLAH SARANA PRASARANA
- LAMPIRAN 5.10** PROFIL JENIS UJI PROFISIENSI YANG DIKUTI DAN HASILNYA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Pulau Bali	5
Gambar 1.2 Statistik pegawai berdasarkan umur	7
Gambar 1.3 Statistik pegawai berdasarkan pendidikan	8
Gambar 1.4 Profil Pegawai Menurut Penempatannya	8
Gambar 1.5 Struktur Organisasi	10
Gambar 3.1 Pengujian Obat	31
Gambar 3.2 Pengujian Obat Tradisional	32
Gambar 3.3 Pengujian Kosmetik	35
Gambar 3.4 Pengujian Suplemen Makanan	37
Gambar 3.5 Pengujian Makanan	38
Gambar 3.6 Pengujian dengan Parameter Kritis	46
Gambar 3.7 Pengawasan Sarana Produksi	48
Gambar 3.8 Pengawasan Sarana Distribusi	50
Gambar 3.9 Sebaran Kegiatan Pengawasan terhadap Sarana Produksi dan Sarana Distribusi Pangan	51
Gambar 3.10 Tindak Lanjut Penyidikan Obat dan Makanan	53
Gambar 3.11 Unit Layanan Pengaduan Konsumen	55
Gambar 3.12 GKPD	56
Gambar 3.13 Diagram Realisasi Anggaran	63

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Kualifikasi dan Kompetensi Personel	9
Tabel 1.2 Data Alat Laboratorium yang dimiliki BBPOM di Denpasar	9
Tabel 2.1 Tujuan, sasaran, indikator kinerja, program / kegiatan BBPOM Di Denpasar	22
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja BBPOM di Denpasar 2015	25
Tabel 3.1 Kriteria Pencapaian Indikator	28
Tabel 3.2 Kegiatan Tidak Efisien Tahun 2015.....	61
Tabel 3.3 Perbandingan anggaran 2015 dengan anggaran 2014	63

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka semua Instansi Pemerintah diwajibkan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP ini juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden RI No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. SAKIP bertujuan mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah agar tercipta pemerintah yang baik dan terpercaya, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM, BBPOM di Denpasar merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) sehingga wajib melaporkan akuntabilitas kinerjanya kepada Kepala Badan POM RI. LAKIP merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis serta sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja atas perjanjian kinerja yang telah ditetapkan antara Kepala BBPOM di Denpasar dengan Kepala Badan POM. Akuntabilitas adalah setiap program dan kegiatan dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kinerjanya atau hasil akhir kepada masyarakat.

Dalam LAKIP ini diuraikan Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Evaluasi Kinerja. Perencanaan Kinerja mulai dari Visi Misi Badan POM (sesuai Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK.04.1.21.03.15.1644 tanggal 30 Maret 2015 tentang penetapan Visi dan Misi Badan POM), Tujuan, Sasaran Strategis, Sasaran Kegiatan beserta indikator dan target jangka menengah, rencana program dan kegiatan untuk mencapai Visi dan Misi sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019. Perjanjian Kinerja merupakan penugasan dari Kepala Badan POM untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan target indikator yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun. Evaluasi kinerja menyangkut evaluasi capaian pelaksanaan kinerja berdasarkan

perjanjian kinerja dan akuntabilitas kinerja terkait pengukuran kinerja dan pengukuran efisiensi kegiatan atas aspek keuangan yang digunakan.

Balai Besar POM di Denpasar telah menetapkan 3 sasaran strategis yaitu :

- Sasaran 1: Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan memiliki 5 indikator dengan capaian :
 - Persentase Obat yang memenuhi syarat : 108 % (memuaskan).
 - Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat : 95% (baik).
 - Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat : 107,11 % (memuaskan).
 - Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat : 127 % (tidak dapat disimpulkan).
 - Persentase Makanan yang memenuhi syarat : 104% (memuaskan).

- Sasaran 2: Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat memiliki 2 indikator dengan capaian :
 - Tingkat Kepuasan Masyarakat : 105% (memuaskan).
 - Jumlah Kabupaten / Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan : 100% (memuaskan).

- Sasaran 3: Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BBPOM di Denpasar memiliki 1 indikator dengan capaian :
 - Nilai SAKIP BBPOM di Denpasar Oleh Badan POM RI : 84,99 (cukup).

Yang merupakan Indikator Kinerja Utama adalah kelima indikator kinerja pada sasaran strategis 1 dan indikator kinerja tingkat kepuasan masyarakat dari sasaran strategis 2 dengan capaian 5 memuaskan dan 1 baik.

BBPOM di Denpasar menetapkan 7 Sasaran Kegiatan untuk mendukung sasaran strategis, dengan capaian kinerja yaitu :

- Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk Obat dan Makanan yang beredar dengan 2 indikator jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis capaian 100% (memuaskan) dan pemenuhan target sampling produk obat di sektor publik (IFK) capaian 100% (memuaskan).

- Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar dengan indikator persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan capaian 120% (memuaskan).
- Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar dengan indikator persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan capaian 113% (memuaskan).
- Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan dengan indikator jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan capaian 100% (memuaskan).
- Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi dengan 2 indikator jumlah layanan publik BBPOM di Denpasar capaian 135% (tidak dapat disimpulkan) dan jumlah komunitas yang diberdayakan capaian 100% (memuaskan).
- Pengadaan sarana dan prasarana yang terkait pengawasan Obat dan Makanan dengan indikator Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar capaian 107% (memuaskan).
- Penyusunan perencanaan, penganggaran, keuangan dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu dengan indikator jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu capaian 100% (memuaskan).

Untuk indikator yang tidak dapat disimpulkan yaitu persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat dan jumlah layanan publik BBPOM di Denpasar, hal ini disebabkan karena penetapan target kinerja yang kurang tepat, upaya yang akan dilakukan adalah Review renstra untuk penentuan target persentase suplemen kesehatan dan jumlah layanan publik BBPOM di Denpasar. Peningkatkan variasi jenis sampel yang disampling dengan kajian risiko yang lebih tajam, serta penentuan parameter uji yang lebih kritis dan lebih luas dengan antisipasi kemungkinan bahan berbahaya yang ditambahkan pada produk tersebut

Upaya yang akan dilakukan untuk indikator kinerja jumlah layanan publik adalah lebih meningkatkan layanan dalam hal ketepatan waktu, kejelasan prosedur dan informasi, kenyamanan tempat pelayanan serta lebih meningkatkan kemampuan SDM dalam pelayanan publik melalui pelatihan kehumasan, motivasi spiritual sehingga timbul paradigma melayani dengan hati.

Berdasarkan pengukuran dan evaluasi kinerja yang dilakukan, secara garis besar diperoleh capaian kinerja sebagai berikut:

- ❖ BBPOM di Denpasar telah mewujudkan 3 sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2015-2019 dan Rencana Kinerja Tahunan 2015.
- ❖ Selama Tahun 2015, dari 155 sub kegiatan yang ditetapkan, telah dilaksanakan dengan rincian sebanyak 148 (95,48%) dilaksanakan dengan efisien dan 7 (4,52%) sub kegiatan dilaksanakan tidak efisien.

Anggaran BBPOM di Denpasar pada tahun 2015 sebesar Rp 24.079.267.000 yang meliputi Belanja Pegawai Rp 6.928.783.000, Belanja Barang Rp 9.258.639.000 serta Belanja Modal Rp 7.891.845.000. Sedangkan realisasinya adalah Rp 22.273.867.088 (92,50%) yang terdiri dari Belanja Pegawai Rp 6.294.919.881 (90,85%), Belanja Barang Rp 8.800.031.433 (95,05%) serta Belanja Modal Rp 7.178.915.774 (90,97%).

Persentase realisasi anggaran tahun 2015 lebih kecil dibandingkan persentase realisasi anggaran tahun 2014. Hal ini terjadi karena sisa anggaran untuk optimalisasi tidak bisa dimanfaatkan dan terbatasnya waktu di akhir tahun. Realisasi anggaran tersebut diatas menunjukkan bahwa hampir seluruh kegiatan BBPOM di Denpasar pada Tahun 2015 telah dapat direalisasikan sesuai dengan target yang ditetapkan (92,50%). Tetapi, masih terdapat beberapa kegiatan yang dapat dikategorikan tidak efisien. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain banyaknya perkara yang ditangani tanpa dilakukan gelar perkara hanya dilakukan gelar kasus karena perkara sudah dapat dituntaskan, adanya kegiatan antar pusat dan balai yang tidak dilaksanakan dan adanya kegiatan yang dilakukan bersamaan dengan bidang-bidang lain. Terkait dengan capaian kinerja tersebut, BBPOM di Denpasar secara terus menerus berupaya meningkatkan koordinasi dengan Badan POM, membuat sinkronisasi jadwal kegiatan antar bidang/sub bagian, melakukan evaluasi secara rutin terhadap target dalam rangka meningkatkan kinerja di masa yang akan datang, meningkatkan kompetensi dan kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) BBPOM di Denpasar melalui pendidikan dan pelatihan, meningkatkan intensitas dan kualitas monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan serta pengelolaan anggaran dan kegiatan dan menambah jumlah SDM karena beban kerja yang terus meningkat serta kemajuan ilmu dan teknologi yang begitu pesat dan memperkuat jejaring kerja dengan lintas sektor terkait.

BAB I PENDAHULUAN

BBPOM di Denpasar adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM RI yang merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang bertugas melakukan pengawasan Obat dan Makanan. Untuk melaksanakan Tupoksi di atas BBPOM di Denpasar menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang dituangkan dalam bentuk Perencanaan Kinerja lima tahunan. Program dari kegiatan tersebut dijabarkan dalam Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja. Untuk selanjutnya dalam mewujudkan target kinerja tahunan maka dibuat Perjanjian Kinerja antara Kepala BBPOM di Denpasar dengan Kepala Badan POM. Pelaksanaan kinerja dievaluasi setiap tri wulan sesuai dengan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja BBPOM di Denpasar. Selanjutnya Perjanjian Kinerja tersebut diukur dalam bentuk laporan kinerja yang akuntabilitasnya diukur atas dasar kesesuaian antara perjanjian kinerja dengan hasil kinerja yang dinyatakan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

A. GAMBARAN UMUM INSTITUSI

Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor 05018/SK/KBPOM tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan POM, BBPOM di Denpasar merupakan salah satu UPT di lingkungan Badan POM di bidang pengawasan Obat dan Makanan, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan POM. Dalam pelaksanaan tugas secara teknis dibina oleh para Deputi dan secara administrasi dibina oleh Sekretaris Utama.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor HK.00.05.21.3592 yang ditetapkan tanggal 9 Mei 2007 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Badan POM Nomor 05018/SK/KBPOM tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di lingkungan Badan POM, cakupan wilayah kerja BBPOM di Denpasar meliputi seluruh wilayah administratif Provinsi Bali yang terdiri



Gambar 1.1. Pulau Bali

dari 9 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Buleleng, Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Bangli, Klungkung, Karangasem dan Kota Denpasar.

Luas wilayah Provinsi Bali adalah 5.780 km² atau 0,29% dari luas kepulauan Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, jumlah penduduk Provinsi Bali hasil registrasi penduduk tahun 2015 sebanyak 4.152.000 jiwa. Kota Denpasar memiliki jumlah penduduk tertinggi yakni 689.150 jiwa (16,60%) dan Kabupaten Jembrana memiliki jumlah penduduk yang paling rendah yakni 322.600 jiwa (7,77%).

BBPOM di Denpasar memiliki Laboratorium yang sudah terakreditasi SNI 17025-2008, disamping itu BBPOM di Denpasar juga telah tersertifikasi ISO 9001-2008. Laboratorium BBPOM di Denpasar merupakan Laboratorium Unggulan untuk pengujian Narkotika dan Psikotropika (NAPZA). Laboratorium pangan dan bahan berbahaya telah mengikuti uji profisiensi yang diselenggarakan oleh provider International (PAFAS, APLAC) sejak tahun 2012 sampai saat ini tetap mengikuti uji profisiensi setiap tahun. Laboratorium kosmetik juga mengikuti Uji Profisiensi International yang dilaksanakan oleh *Bureau of Cosmetics and Hazardous Substances Departement of Medical Sciences Ministry of Public Health, Thailand*. Dalam sistem INSW (Indonesian National Single Window) telah terhubung dengan Bea Cukai sejak tahun 2012. BBPOM di Denpasar memiliki Media Sosial yang selalu update setiap hari untuk memberikan Informasi mengenai Obat dan Makanan dimana memiliki follower twiter sebanyak 799 dan friend di facebook 1162. Jumlah untuk tahun 2015 perkara yang diungkap di wilayah Provinsi Bali sebanyak 9 yang sudah sampai ke Pengadilan.

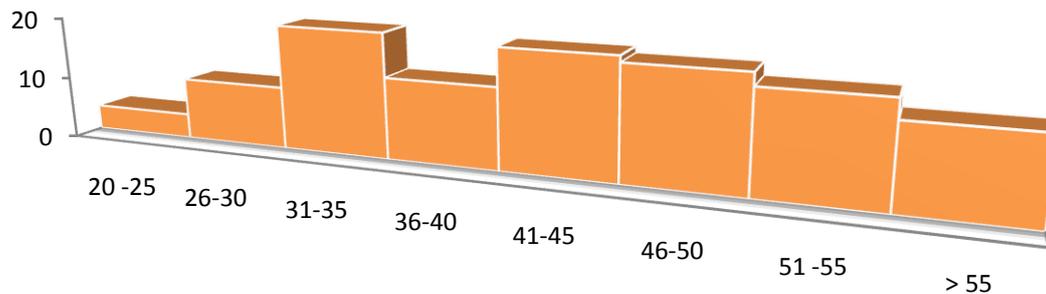
Dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan, BBPOM di Denpasar melakukan pengawasan terhadap 3852 sarana. Jumlah tersebut terdiri dari 671sarana produksi dan 3.181 sarana distribusi.

Tahun 2015 BBPOM di Denpasar memiliki 103 orang pegawai. Dengan rincian 7 orang (6,80%) golongan II, 82 orang (79,61%) golongan III, dan sejumlah 14 orang (13,59%) golongan IV. Ditinjau dari segi umur dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- Usia 20 – 25 sebanyak 4 orang
- Usia 26 - 30 sebanyak 10 orang
- Usia 31 – 35 sebanyak 20 orang
- Usia 36 – 40 sebanyak 13 orang
- Usia 41 – 45 sebanyak 19 orang

- Usia 46 – 50 sebanyak 18 orang
- Usia 51 – 55 sebanyak 16 orang
- Usia diatas 56 sebanyak 13 orang

Data Pegawai Berdasarkan Umur

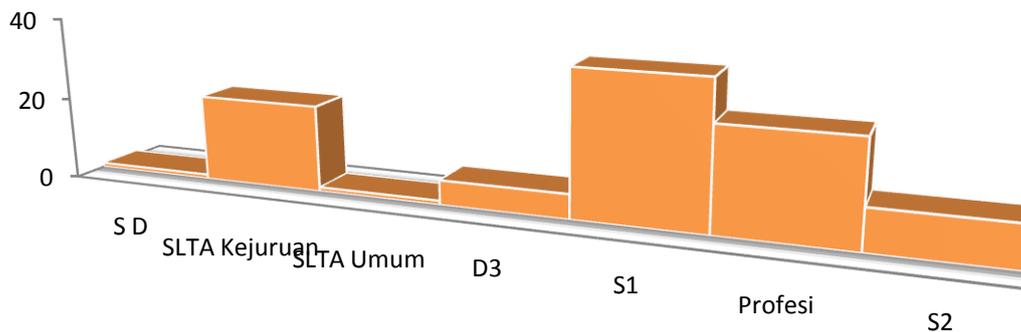


Gambar 1.2 Statistik pegawai berdasarkan umur

Ditinjau dari tingkat pendidikan, pegawai BBPOM di Denpasar dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- Pendidikan SD sebanyak 1 orang
- Pendidikan SLTA Kejuruan sebanyak 11 orang
- Pendidikan SLTA Umum sebanyak 5 orang
- Pendidikan D3 sebanyak 8 orang
- Pendidikan S1 sebanyak 42 orang
- Pendidikan Profesi sebanyak 25 orang
- Pendidikan S2 sebanyak 11 orang

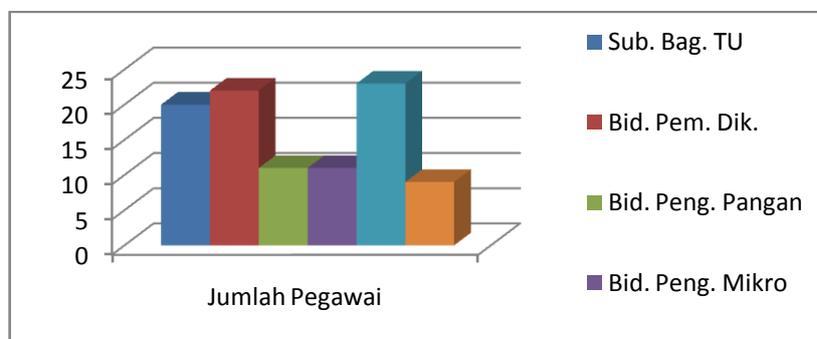
Statistik Pegawai Berdasarkan Pendidikan



Gambar 1.3 Statistik pegawai berdasarkan pendidikan

Sumber daya manusia tersebut penempatannya yaitu di Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan 24 orang, Bidang Pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya 13 orang, Bidang Pengujian Mikrobiologi 10 orang, Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen 23 orang, Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen 10 orang, dan Sub Bagian Tata Usaha 23 orang termasuk 1 orang Kepala Balai.

Diagram berikut menunjukkan data Pegawai BBPOM di Denpasar menurut penempatannya:



Gambar 1.4 Profil Pegawai Menurut Penempatannya

Dalam rangka pengembangan SDM, tahun 2015 sebanyak 1 orang pegawai sedang mengikuti pendidikan S1, 5 orang pegawai mengikuti Pendidikan S2, 1 orang pegawai telah berhasil menyelesaikan pendidikan S2. Selain itu pengembangan SDM juga dilakukan melalui pelatihan baik pelatihan teknis maupun manajerial

Tabel 1.1. Data Kualifikasi dan Kompetensi Personel

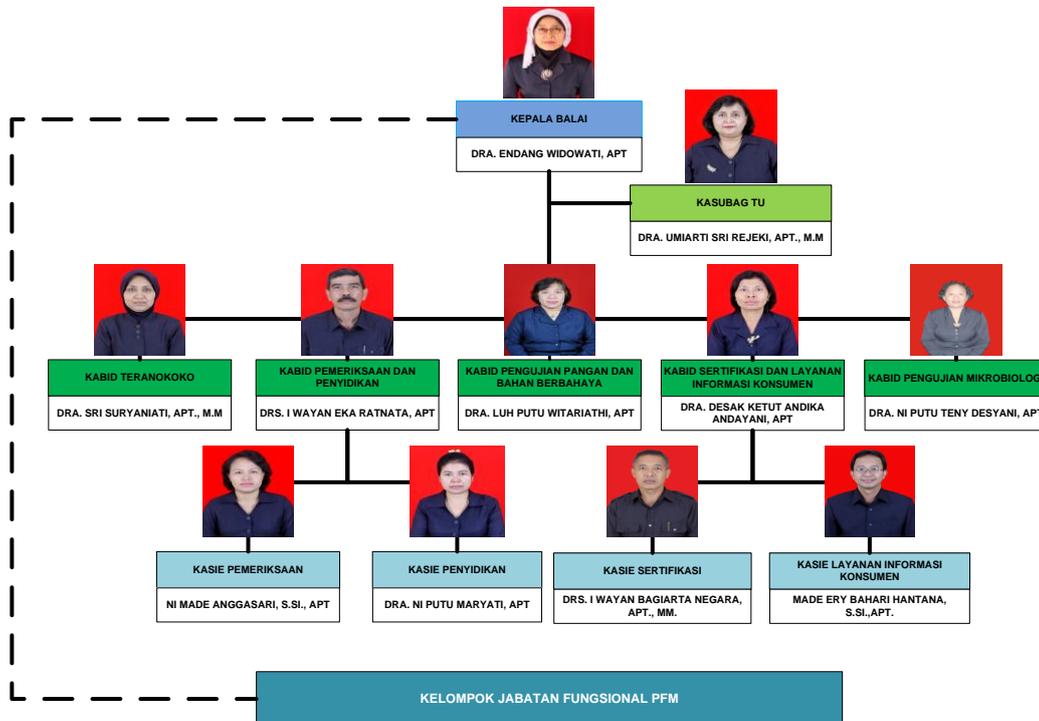
No	Kualifikasi dan Kompetensi Pegawai	Jumlah	Keterangan
1	PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil)	14	-
2.	PFM (Pengawas Farmasi dan Makanan)	60	-
3.	CDOB (Cara Distribusi Obat yang Baik)	8	2 Junior, 3 Senior, 2 Kepala, 1 Nasional
4.	Inspektur Obat Tradisional	3	3 Topik Khusus
5.	Inspektur NAPZA	1	
6.	Inspektur Kosmetika	5	3 Junior, 2 Senior
7.	Food Inspektur	17	6 Dasar, 5 Muda, 6 Madya,
8.	Safety Assesor Kosmetik	1	
9.	Auditor Pangan, Obat Tradisional dan Kosmetik	6	
10.	Bendahara	6	
11.	Perencana	1	Pertama
12	Analisis Kepegawaian	2	Muda dan Terampil
13	Arsiparis	1	Terampil
14	Pranata Komputer	1	Pertama
15	PBBJ	17	

Tabel 1.2. Data Alat Laboratorium yang dimiliki BBPOM di Denpasar :

No	Nama	Jumlah	Keterangan
1	LC MSMS	1	
2	GCMS	1	
3.	HPLC	4	
4.	UPLC	1	
5.	Spektrofotometer UV – VIS	4	
6.	Dissolution Tester	1	
7.	GC detektor FID	1	
8.	AAS dengan flame, GFA, HVG dan MVU	1	
9.	TLC System	1	
10.	FT-IR	2	
11.	ELISA Reader + Washer	1	

B. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan POM RI No. 05018/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di Lingkungan Badan POM, maka untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Balai Besar POM di Denpasar dibentuk dengan struktur organisasi sebagai berikut :



Gambar 1.5 Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Balai Besar POM di Denpasar terdiri dari 5 Bidang, 4 Seksi, 1 Sub Bagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional, sebagai berikut :

- ❖ Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen.
- ❖ Bidang Pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya.
- ❖ Bidang Pengujian Mikrobiologi.
- ❖ Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan, dengan 2 seksi yaitu Seksi Pemeriksaan dan Seksi Penyidikan.
- ❖ Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen, dengan 2 seksi yaitu Seksi Sertifikasi dan Seksi Layanan Informasi Konsumen.
- ❖ Sub Bagian Tata Usaha.
- ❖ Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor 05018/SK/KBPOM tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM, yang kemudian diperbaharui dengan Surat Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.00.05.21.4232 tahun 2004, Balai Besar POM di Denpasar sebagai salah satu UPT Badan POM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan produk terapeutic, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, keamanan pangan dan bahan berbahaya.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut diatas, Balai Besar POM di Denpasar menyelenggarakan fungsi:

- ❖ Penyusunan rencana dan program pengawasan Obat dan Makanan.
- ❖ Pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium pengujian dan penilaian mutu produk terapeutic, narkotik, psikotropik dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetik, produk komplimen, pangan dan bahan berbahaya.
- ❖ Pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu secara mikrobiologi.
- ❖ Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan pada sarana produksi dan distribusi.
- ❖ Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum.
- ❖ Pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu yang ditetapkan oleh kepala Badan POM.
- ❖ Pelaksanaan kegiatan layanan informasi konsumen.
- ❖ Evaluasi dan penyusunan laporan pengujian Obat dan Makanan.
- ❖ Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.
- ❖ Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan POM, sesuai dengan bidang tugasnya.

Masing-masing bidang, seksi, sub bagian dan kelompok jabatan fungsional tersebut mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen

Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium pengujian dan penilaian mutu di bidang produk terapeutik, narkotika, obat tradisional, kosmetika dan produk komplemen.

2. Bidang Pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya

Bidang Pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu di bidang pangan dan bahan berbahaya.

3. Bidang Pengujian Mikrobiologi

Pengujian Mikrobiologi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu secara mikrobiologi.

4. Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan

Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh untuk pengujian, dan pemeriksaan sarana produksi, distribusi dan instansi kesehatan serta penyidikan kasus pelanggaran hukum di bidang produk terapeutik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :

- ❖ Penyusunan rencana dan program pemeriksaan dan penyidikan Obat dan Makanan.
- ❖ Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan sarana produksi, distribusi dan instansi kesehatan di bidang produk terapeutik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetika dan produk komplemen.

- ❖ Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi dibidang pangan dan bahan berbahaya.
- ❖ Pelaksanaan penyidikan terhadap kasus pelanggaran hukum.
- ❖ Evaluasi dan penyusunan laporan pemeriksaan dan penyidikan Obat dan Makanan.

Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan terdiri dari:

a. Seksi Pemeriksaan

Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh untuk pengujian, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi produk terapeutic, narkotika, psicotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetika, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya.

b. Seksi Penyidikan

Seksi Penyidikan mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap kasus pelanggaran hukum di bidang produk terapeutic, narkotika, psicotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetika, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya.

5. Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen

Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu dan layanan informasi konsumen.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen menyelenggarakan fungsinya :

- ❖ Penyusunan rencana dan program sertifikasi produk dan layanan informasi konsumen.
- ❖ Pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu.
- ❖ Pelaksanaan layanan informasi untuk konsumen.
- ❖ Evaluasi dan penyusunan laporan sertifikasi produk dan layanan informasi konsumen.

Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen terdiri dari:

a. Seksi Sertifikasi

Seksi Sertifikasi mempunyai tugas melakukan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu.

b. Seksi Layanan Informasi Konsumen

Seksi Layanan Informasi Konsumen mempunyai tugas melakukan layanan informasi konsumen.

6. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi di lingkungan Balai Besar POM di Denpasar.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jabatan fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan dan jabatan Fungsional Umum.

D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

BBPOM di Denpasar merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Badan POM yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 05018/SK/KBPOM tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di lingkungan Badan POM. BBPOM di Denpasar sebagai UPT di Lingkungan Badan POM ini mempunyai peranan penting sebagai perpanjangan tangan dari Badan POM yaitu melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan produk terapanik, narkotika, priotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetika, produk komplemen, keamanan pangan dan bahan berbahaya di wilayah Provinsi Bali.

E. ISU STRATEGIS

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan di bidang pengawasan obat dan makanan dan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, dapat disampaikan isu-isu strategis yang memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan pengawasan obat dan makanan pada BBPOM di Denpasar sebagai berikut:

1. Belum sepenuhnya tercapai penapisan produk dalam rangka Pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*Pre Market*)
 - a. Sebagai daerah tujuan wisata maka intensitas lalu lintas orang dan barang – barang khususnya produk kebutuhan wisatawan sangat tinggi , hal ini rentan terhadap peredaran produk ilegal dan disinyalir menjadi tempat untuk lalu lintas peredaran gelap Narkotika. Oleh karena itu Pengawasan Obat dan Makanan di daerah perbatasan/pelabuhan perlu ditingkatkan dengan melakukan kerjasama yang lebih intensif dengan instansi terkait pemangku kepentingan (mulai dari Bea Cukai, Dinas Perdagangan, Kepolisian, Kejaksaan, Kementerian Kesehatan dan instansi terkait lainnya), dalam melakukan pencegahan terhadap peningkatan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum. Untuk meningkatkan pelayanan publik menjadi perlu menempatkan petugas BBPOM di Denpasar di daerah perbatasan (Bandara dan Pelabuhan) seperti yang pernah dilakukan pada tahun sebelumnya.
 - b. Wilayah BBPOM di Denpasar merupakan daerah potensial untuk pengembangan Obat Asli Indonesia, terutama dengan tersedianya ribuan ”lontar usadha” yang merupakan warisan leluhur yang telah dimanfaatkan secara turun menurun. Produksi Obat Tradisional baik yang dilakukan oleh UMOT atau UKOT memerlukan bimbingan dan pembinaan untuk pengembangannya baik dari segi proses produksi (CPOTB) maupun pengembangan SDM nya.
 - c. UMKM kosmetik juga mengalami perkembangan yang sangat pesat di Bali khususnya produksi Kosmetika Tradisional dan terbuat dari bahan-bahan Herbal. Terhadap UMKM yang memproduksi kosmetika dari bahan herbal memerlukan pembinaan yang lebih intensif dalam pengembangannya karena membutuhkan informasi yang lebih detail menyangkut aspek keamanan bahan baku yang digunakan.

- d. Importasi OMKABA baik untuk kepentingan komersial (secara online) maupun untuk penggunaan sendiri tanpa melalui proses SKI (Surat Keterangan Impor) dengan intensitas sangat tinggi. Hal ini membutuhkan kerjasama lintas sektor khususnya dengan Direktorat Bea dan Cukai yang lebih intensif lagi agar produk produk tersebut dapat diawasi secara ketat importasinya sehingga produk yang tidak memenuhi standar dan membahayakan kesehatan masyarakat dapat dicegah.
2. Belum optimalnya pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*Post Market*)
 - a. UMKM di daerah Bali perkembangannya sangat pesat, didorong lagi oleh kebijakan pemerintah mempermudah ijin UMKM yang dapat diterbitkan oleh pihak Kelurahan dan Kecamatan sehingga pertumbuhannya sangat pesat. Pertumbuhan tersebut tidak diiringi oleh pengetahuan dan wawasan para produsen IRTP tentang keamanan pangan. Hal ini tergambar dari hasil pengawasan BBPOM di Denpasar yaitu masih banyak hasil uji sampling produk IRTP mengandung bahan berbahaya diantaranya pengawet, pemanis dan pewarna. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan SDM yang dimiliki oleh BBPOM di Denpasar untuk melaksanakan pengawasan secara intensif dan peran stakeholder terkait belum optimal.
 - b. Dari hasil pengawasan dan uji laboratorium BBPOM di Denpasar ditemukan Obat Tradisional yang mengandung bahan baku Obat demikian juga dengan produk Kosmetik yang mengandung Bahan Berbahaya dilarang dan tanpa ijin edar.
 3. Belum Efektifnya Pemberdayaan Masyarakat melalui Komunikasi , Informasi dan Edukasi dalam rangka peningkatan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan Untuk dapat melindungi dirinya dari produk OMKABA yang tidak memenuhi syarat maka perlu dilakukan pemberdayaan masyarakat konsumen melalui penyebaran informasi dan memberikan edukasi melalui penyuluhan kepada kelompok – kelompok masyarakat di setiap lini. Kepada masyarakat produsen juga perlu diberikan informasi dan edukasi agar mengedepankan tanggung jawab moral yaitu melakukan kegiatan produksi dengan mengikuti cara-cara berproduksi

yang baik dan tanggung jawab hukum yaitu dengan melengkapi perijinan yang diperlukan dalam memproduksi. Pada saat ini pemberdayaan masyarakat sudah dilakukan tetapi masih perlu ditingkatkan baik dari segi kualitas dan kuantitasnya.

4. Pengawasan terhadap Obat Tradisional perlu lebih ditingkatkan terutama pada Obat Tradisional asing melalui penertiban produk obat tradisional asing atau import ilegal. Disamping itu mengingat masih diketemukannya obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat yang telah dilarang maka perlu tetap dilanjutkan upaya pembinaan terhadap produsen setempat melalui kerjasama dengan lintas sektor. Rendahnya kepatuhan terhadap standar Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik, merupakan dasar untuk meningkatkan mutu produk Obat Tradisional.
5. Di bidang pengawasan produk terapeutik/obat, hasil pengujian terhadap sampel obat yang beredar pada dasarnya telah baik. Namun demikian mengingat tingginya resiko bagi kesehatan maka pengawasan untuk meningkatkan kepatuhan produk obat yang beredar terhadap standar yang berlaku tetap merupakan prioritas. Upaya ini diikuti pula dengan peningkatan kemampuan inspektur di lingkungan BBPOM di Denpasar berkaitan dengan pemberantasan Obat palsu selain kegiatan yang bersifat operasional dan peningkatan kerja sama lintas sektor.
6. Dalam menghadapi permasalahan pengawasan Obat dan Makanan yang semakin luas dan kompleks ke depan meskipun secara *de facto* tugas pokok dan fungsi telah dapat dilaksanakan, namun Badan POM belum didukung oleh perangkat hukum yang kuat berupa Undang-Undang tentang pengawasan Obat dan Makanan yang akan mendasari tugas dan tanggung jawab serta kewenangan Badan POM. Adanya undang – undang ini selain diperlukan oleh konsumen juga diperlukan oleh kalangan pelaku usaha untuk mendapatkan kepastian hukum dan dalam mengembangkan bisnis dan industrinya Indonesia.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) dituangkan dalam perjanjian kinerja, yaitu suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada.

Renstra BBPOM di Denpasar tahun 2015-2019 telah disusun dengan mengacu kepada Renstra Badan POM tahun 2015-2019 yang menuangkan: Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pencapaian Tujuan/Sasaran yang dijabarkan dalam bentuk Kebijakan dan Program.

1. VISI DAN MISI

Dalam melaksanakan kegiatan BBPOM di Denpasar berpedoman pada visi dan misi Badan POM sebagai lembaga induk. Visi dan Misi Badan POM ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan POM, yaitu sebagai berikut:

Visi :

" Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa."

Misi :

1. Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat
2. Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Badan Pengawas Obat dan Makanan

2. BUDAYA ORGANISASI

Untuk membangun organisasi yang efektif dan efisien, budaya organisasi Badan POM dikembangkan dengan nilai-nilai dasar sebagai berikut :

1. Profesional

Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.

2. Integritas

Konsistensi dengan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan

3. Kredibilitas

Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.

4. Kerjasama Tim

Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.

5. Inovatif

Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.

6. Responsif/Cepat Tanggap

Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

3. TUJUAN

Sesuai dengan visi dan misi Badan POM serta mengacu kepada tujuan utama pembangunan pengawasan Obat dan Makanan tahun 2015-2019 yang dicanangkan oleh Badan POM, maka tujuan utama pembangunan pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Bali tahun 2015 – 2019 adalah:

1. Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat;
2. Meningkatnya daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi.

4. SASARAN STRATEGIS

Visi, Misi dan tujuan tersebut telah dijabarkan ke dalam sasaran strategis Balai Besar POM di Denpasar, yang menggambarkan target yang akan dihasilkan selama kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (*performance plan*).

Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

Penetapan Sasaran Strategis Balai Besar POM di Denpasar merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Balai Besar POM di Denpasar dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Balai Besar POM di Denpasar serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh yang menyangkut keseluruhan satuan kerja di lingkungan Badan POM. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang telah ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategis juga telah dapat dicapai.

Sasaran Strategis selama lima tahun adalah sebagai berikut :

- 1. Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan**
- 2. Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat.**
- 3. Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BBPOM di Denpasar**

a. Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan

Penjabaran indikator diatas sebagai berikut :

- 1) Persentase Obat yang memenuhi syarat sebesar 92,00 % pada tahun 2015 dan 94,00 % pada akhir Renstra tahun 2019
- 2) Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat sebesar 80,00 % pada tahun 2015 dan 84,00 % pada akhir Renstra tahun 2019
- 3) Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat sebesar 89,00 % pada tahun 2015 dan 93,00 % pada akhir Renstra tahun 2019
- 4) Persentase Suplemen Makanan yang memenuhi syarat sebesar 79,00 % pada tahun 2015 dan 83,00 % pada akhir Renstra tahun 2019
- 5) Persentase Makanan yang memenuhi syarat sebesar 88,10 % pada tahun 2015 dan 90,10 % pada akhir Renstra tahun 2019

b. Meningkatnya Kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan dengan Pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat

Indikator :

- 1) Tingkat kepuasan masyarakat sebesar 80,00 % pada tahun 2015 dan 82,00 % pada akhir Renstra tahun 2019.

- 2) Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi obat dan makanan sebanyak 3 Kabupaten di tahun 2015 dan pada akhir Renstra tahun 2019 sebanyak 7 Kabupaten.

c. Meningkatkan Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM

Indikator :

- 1) Nilai SAKIP dari BPOM, target tahun 2015-2019 adalah nilai A

5. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis yang dicanangkan oleh Badan POM sebagai organisasi induk (Eselon I) dan sesuai dengan Renstra Balai Besar POM di Denpasar tahun 2015-2019. Program pengawasan Obat dan Makanan dijabarkan menjadi kegiatan-kegiatan di BBPOM di Denpasar. Indikator kegiatan dari masing – masing sasaran strategis adalah :

- i. Indikator kegiatan dari sasaran program menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan :
 1. Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan Makanan yang beredar.
 - a. Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis sebanyak 3500 sampel.
 - b. Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK) sebesar 100 %
 2. Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar.
Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan sebesar 25%.
 3. Meningkatnya kualitas sarana Distribusi yang memenuhi standar.
Persentase cakupan pengawasan sarana Distribusi Obat dan Makanan sebesar 24%.
 4. Meningkatnya hasil tindak lanjut Penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan
Jumlah perkara di Bidang Obat dan Makanan sebanyak 9 perkara

- ii. Indikator kegiatan dari sasaran program meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat.
 - 1. Meningkatnya kerjasama komunikasi, informasi dan edukasi
 - a. Jumlah layanan publik BBPOM di Denpasar 1145 layanan.
 - b. Jumlah Komunitas yang diberdayakan sebanyak 17 desa.
- iii. Indikator kegiatan dari sasaran program meningkatnya kualitas, kapasitas, kelembagaan BBPOM di Denpasar.
 - 1. Pengadaan sarana dan prasarana yang terkait Pengawasan Obat dan Makanan
Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar sebesar 70 %.
 - 2. Penyusunan perencanaan, Penganggaran, keuangan dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu sebanyak 10 dokumen.

Secara keseluruhan tujuan, sasaran, indikator kinerja dan program/kegiatan BBPOM di Denpasar digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.1 Tujuan, sasaran, indikator kinerja, program / kegiatan BBPOM Di Denpasar

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan
1.	Meningkatnya Jaminan Produk Obat dan Makanan aman, bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat	1.Menguatnya sistem Pengawasan Obat dan Makanan	1.Persentase Obat yang Memenuhi syarat. 2.Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat. 3.Persentase Kosmetika yang memenuhi syarat 4.Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat.	1.Pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan. 2.Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Makanan. 3.Melaksanakan sampling Obat dan Makanan. 4.Intensifikasi Pengawasan Produk Fortifikasi. 5.Investigasi awal dan penyidikan terhadap pelanggaran terhadap Bidang Obat dan Makanan. 6.Sertifikasi sarana Obat dan Makanan dalam rangka registrasi Obat dan Makanan.

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan
			5. Persentase Makanan yang memenuhi syarat.	7. Kampanye Pasar Aman dari bahan berbahaya. 8. Pengawasan Pangan melalui Mobil Laboratorium Keliling. 9. Pemeriksaan secara laboratorium produk Obat dan Makanan. 10. Pelayanan Informasi Obat dan Makanan, Informasi Keracunan dan Teknologi Informasi.
2.	Meningkatnya daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi	2. Meningkatkan Kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan dan Partisipasi Masyarakat.	1. Tingkat Kepuasan Masyarakat. 2. Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan Komitmen untuk pelaksanaan Pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan.	1. Audit Surveilans penerima Piagam Bintang Keamanan Pangan. 2. Advokasi ke instansi pemerintah lainnya 3. Operasional Sentra Informasi Keracunan (SIKER) 4. Pameran Pembangunan 17 Agustus BBPOM di Denpasar. 5. Penyebaran Informasi Produk Farmakes. 6. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE). 7. Keamanan Pangan Desa (KPD). 8. ULPK 9. Bimtek CPKB, CPPB, CPOTB. 10. Bimtek Lay Out Sarana Produksi Obat Tradisional dan Kosmetik.

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan
		3. Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	1. Nilai SAKIP BBPOM di Denpasar oleh BPOM.	1. Koordinasi perumusan Renstra dan pengembangan organisasi, penyusunan program dan anggaran, keuangan serta evaluasi dan pelaporan. 2. Peningkatan kompetensi SDM. 3. Pengawasan dan Peningkatan akuntabilitas Kinerja. 4. Peningkatan Sarana dan Prasarana BBPOM di Denpasar. 5. Pengadaan, Pemeliharaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Penunjang.

B. PERJANJIAN KINERJA

Rencana Kinerja Tahunan memuat informasi tentang sasaran tahunan yang ingin dicapai pada tahun yang bersangkutan beserta program yang diperlukan untuk mencapainya, indikator kinerja sasaran tahunan dan target capaiannya, kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun bersangkutan yang merupakan penjabaran dari program tahunan, Indikator Kinerja Utama serta Indikator Kinerja Kegiatan dan target capaiannya, sesuai SK Kepala Balai Besar POM di Denpasar tentang Indikator Kinerja Utama tahun 2015 HK.07.107.06.15.1.1657, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015 Nomor. HK.07.107.04.15.2344, tanggal 1 April 2015

Penetapan Kinerja disusun setiap tahun didasarkan pada Rencana Kinerja Tahunan yang telah tertuang ke dalam DIPA. Penetapan Kinerja terdiri dari format yang menghubungkan Sasaran pada Renstra, Program, dan Kegiatan yang telah ditetapkan indikator kinerja *outputnya* dan *outcomenya*, serta anggaran yang digunakan dan telah ditetapkan dalam SK Kepala BBPOM di Denpasar tentang Penetapan Kinerja tahun 2015, nomor HK.02.107.04.15.2345, tanggal 1 April 2015.

Perjanjian Kinerja BBPOM di Denpasar Tahun 2015 yang telah ditetapkan sebagai Penetapan Kinerja Tahun 2015 sesuai pada Lampiran 1 yang ditetapkan pada tanggal 1 April 2015.

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja BBPOM di Denpasar 2015

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target
(1)		(2)		(3)
1.	Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat		92,00%
		2. Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat		80,00%
		3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat		89,00%
		4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat		79,00%
		5. Persentase Makanan yang memenuhi syarat		88,10%
2.	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat.	1. Tingkat Kepuasan Masyarakat		80%
		2. Jumlah Kabupaten / Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan		3
3.	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	Nilai SAKIP BBPOM di Denpasar oleh Badan POM RI		A
Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan				
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk Obat dan Makanan yang beredar	1. Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis		3500
		2. Pemenuhan target sampling produk obat di sektor publik (IFK)		100%
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan		25
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standard	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan		24
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan		9

Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat

1	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	1	Jumlah layanan publik BBPOM di Denpasar	1145
		2	Jumlah komunitas yang diberdayakan	17

Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BBPOM di Denpasar

1	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Terkait Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	70%
2	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10

Kegiatan

Pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Denpasar

Anggaran

Rp. 24.329.504.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan.

Sasaran Strategis BBPOM di Denpasar yang merupakan penjabaran dari misi dan tujuan strategis yang telah ditetapkan menggambarkan sesuatu yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan menjadi target sasaran tahunan melalui program dan kegiatan yang dilakukan. Pengukuran kinerja tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan target kinerja dan realisasi kinerja setiap indikator dari sasaran strategis dan sasaran kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja tahun 2015. Realisasi kinerja dihitung berdasarkan definisi operasional setiap indikator yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja pada Renstra 2015-2019, Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing – masing indikator .

Sebagaimana telah diuraikan dalam Bab II, dalam Renstra Balai Besar POM di Denpasar tahun 2015-2019 ditetapkan 3 sasaran strategis dan 7 sasaran kegiatan untuk mencapai tujuan strategis sesuai dengan visi BPOM 2015-2019 “Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa”. Untuk mengukur capaian ke 3 sasaran tersebut, ditetapkan 8 indikator sasaran strategis dan 9 indikator sasaran kegiatan.

- Sasaran 1 yaitu : Menkuatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan memiliki 5 indikator sasaran strategis dan 4 sasaran kegiatan dengan 5 indikator ,
- Sasaran 2 yaitu: Meningkatkan kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat memiliki 2 indikator sasaran strategis dan 1 sasaran kegiatan dengan 2 indikator
- Sasaran 3 yaitu : Meningkatkan kualitas kapasitas kelembagaan BBPOM di Denpasar memiliki 1 indikator sasaran strategis dan 2 sasaran kegiatan dengan 2 indikator

Prosentase (%) Capaian Indikator dihitung menggunakan rumus sesuai dengan petunjuk teknis sebagai berikut :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Untuk mengukur keberhasilan tercapainya sasaran kinerja digunakan Kriteria Pencapaian Indikator dari Badan POM sebagai berikut :

Tabel 3.1 Kriteria Pencapaian Indikator

No	Kriteria Pencapaian	Persentase
1	Tidak Dapat Disimpulkan	$X > 125\%$
2	Memuaskan	$100\% \leq X \leq 125\%$
3	Baik	$90\% \leq X < 100\%$
4	Cukup	$75\% \leq X < 90\%$
5	Kurang	$X < 75\%$

Untuk pengukuran efisiensi difokuskan pada pengukuran indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$\begin{aligned} SE &= \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} \\ &= \frac{100\%}{100\%} \\ &= 1 \end{aligned}$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

Jika $IE \geq SE$, maka kegiatan dianggap efisien
Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Matriks Pengukuran Kinerja Balai Besar POM di Denpasar Tahun 2015 dapat dilihat pada Lampiran 2. Dari perhitungan pencapaian sasaran tersebut, menunjukkan bahwa secara umum sasaran strategis maupun sasaran kegiatan tahun 2015 telah tercapai dengan kriteria 12 memuaskan, 2 baik, 2 tidak dapat disimpulkan, dan hanya 1 dengan kriteria cukup.

Pengukuran terhadap indikator sasaran strategis tahun 2015 diperoleh hasil sebagai berikut :

- 6 indikator yang capaiannya lebih dari atau sama dengan 100 % yaitu :
 - Persentase Obat yang memenuhi syarat
 - Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat
 - Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat
 - Persentase Makanan yang memenuhi syarat,
 - Tingkat Kepuasan Masyarakat
 - Jumlah Kabupaten / Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan
- 2 indikator masih dibawah 100% yaitu :
 - Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat
 - Nilai SAKIP BBPOM di Denpasar oleh Badan POM RI.

Kelima indikator di Sasaran Strategis I dan satu indikator Sasaran Strategi II yaitu Tingkat Kepuasan Masyarakat merupakan Indikator Kinerja Utama BBPOM di Denpasar. Indikator pada Sasaran Strategis I dihitung berdasarkan sampling produk Obat dan Makanan yang memiliki Nomor Ijin Edar (NIE) Badan POM.

A.1 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Di bawah ini diuraikan capaian masing-masing sasaran strategis sebagai berikut:

1. Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan

Untuk sasaran pertama ini, terdapat 5 indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat capaiannya yaitu:

1. Persentase obat yang memenuhi syarat, dengan target 92%
2. Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat, dengan target 80%
3. Persentase kosmetik yang memenuhi syarat, dengan target 89%
4. Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat, dengan target 79%
5. Persentase makanan yang memenuhi syarat, dengan target 88,10%

Masing-masing pengukuran indikator dan analisa capaian akuntabilitas dijelaskan sebagai berikut:

a) Indikator persentase Obat yang memenuhi syarat

- **Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2015**

Hasil pengukuran indikator kinerja persentase obat yang memenuhi syarat terhadap target yang telah ditetapkan pada tahun 2015 sebagai berikut :

Indikator Kinerja		Target 2015	Realisasi	Capaian	Kriteria
1.	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	92,00%	99,00%	108%	memuaskan

- **Perbandingan realisasi kinerja dengan baseline dan target jangka menengah (RPJM) yaitu akhir Renstra tahun 2019 sebagai berikut :**

Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian Baseline	Capaian RPJM	
	Baseline	RPJM				
1.	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	92,00%	94,00%	99,00%	107,61	105,32 %

- **Analisis Akuntabilitas Kinerja**

Hasil Pengukuran terhadap indikator kinerja persentase Obat yang memenuhi syarat terlihat bahwa capaian indikator kinerja yaitu sebesar 108% dengan kriteria **memuaskan**. Realisasi kinerja indikator tersebut berdasarkan dengan hasil pengujian sampling obat yang dilakukan di seluruh Provinsi Bali dengan hasil memenuhi syarat sebanyak 693 sampel (99%) dari 700 sampel. Dengan realisasi kinerja persentase obat yang memenuhi syarat sebanyak 99,00% menunjukkan bahwa obat yang beredar di Provinsi Bali cukup aman, berkhasiat dan bermutu sehingga dapat meningkatkan kesehatan masyarakat. Peningkatan sistem pengawasan Obat berbasis risiko telah diterapkan, sehingga efektif dapat melindungi masyarakat dari peredaran Obat yang membahayakan kesehatan di Provinsi Bali, hal ini berarti bahwa sasaran strategi Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan telah dapat tercapai.

Perbandingan capaian dengan baseline dan target RPJM tahun 2019 menunjukkan bahwa realisasi tahun 2015 sudah melampaui target tahun 2019. Adanya perbedaan prioritas sampling setiap tahun dan perbedaan trend penyakit pada masyarakat ataupun wabah penyakit setiap tahun maka kemungkinan akan ada fluktuasi capaian di setiap tahun hingga tahun 2019.

Persentase Obat yang memenuhi syarat pada tahun 2014 adalah 99,87%, jika dibandingkan dengan tahun 2015 ada penurunan persentase tetapi tidak terlalu jauh. Hal ini kemungkinan karena perbedaan jenis sampel dan parameter uji serta tempat sampling.

Untuk selanjutnya, BBPOM di Denpasar harus lebih ketat dan inovatif dalam melakukan pengawasan terhadap distribusi Obat serta meningkatkan kemampuan SDM laboratorium untuk melakukan pengujian mengikuti perkembangan obat yang semakin pesat. Sistem Pengawasan Obat dan Makanan perlu ditingkatkan mengikuti kecenderungan pelanggaran yang terjadi atau bahkan lebih proaktif melakukan antisipasi untuk menjamin Obat yang beredar di Provinsi Bali aman dan bermutu sehingga meningkatkan kesehatan masyarakat.



Gambar 3.1. Pengujian Obat

b) Indikator persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat

- **Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2015**

Hasil pengukuran indikator kinerja persentase obat tradisional yang memenuhi syarat terhadap target yang telah ditetapkan pada tahun 2015 sebagai berikut :

Indikator Kinerja		Target 2015	Realisasi	Capaian	Kriteria
2.	Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	80,00%	76,00%	95 %	Baik

- **Perbandingan realisasi kinerja dengan baseline dan target jangka menengah (RPJM) yaitu akhir Renstra tahun 2019 sebagai berikut :**

Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian Baseline	Capaian RPJM	
	Baseline	RPJM				
2.	Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	80,00%	84,00%	76,00%	95 %	90,47 %

- **Analisis Akuntabilitas Kinerja**

Hasil pengukuran terhadap indikator kinerja persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat terlihat bahwa capaian indikator kinerja yaitu sebesar 95% dengan kriteria **baik**. Realisasi kinerja indikator tersebut berdasarkan dengan hasil pengujian sampling Obat Tradisional yang dilakukan di seluruh Provinsi Bali dengan hasil memenuhi syarat sebanyak 399 sampel (76,00%) dari 525 sampel. Walaupun indikator tersebut mendapatkan kriteria baik tetapi sebenarnya capaiannya masih dibawah target dimana realisasi persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat hanya 76,00%. Perbandingan realisasi kinerja indikator Obat Tradisional yang memenuhi syarat dengan baseline dan target RPJM tahun 2019 menunjukkan bahwa realisasi tahun 2015 masih dibawah baseline dan target tahun 2019 dengan capaian kurang dari 100%. Dari hasil pengujian Obat Tradisional, yang tidak memenuhi syarat karena mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) 4 sampel (0,76%) dan yang tidak memenuhi syarat mikrobiologi 109 sampel (20,76%).



Gambar 3.2. Pengujian Obat Tradisional

Persentase hasil pengujian obat tradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) tahun 2014 sebesar 0,52%. Jika dibandingkan dengan tahun 2015 terlihat obat tradisional yang mengandung BKO mengalami peningkatan sebanyak 0,24%, peningkatan ini kemungkinan disebabkan karena adanya perbedaan jenis sampel yang disampling dengan tahun sebelumnya. Persentase sampel yang tidak memenuhi syarat mikrobiologi sebanyak 20,76% menunjukkan bahwa Obat Tradisional yang beredar di Provinsi Bali masih banyak yang tidak memenuhi syarat mikrobiologi. Hal ini disebabkan karena proses produksi (CPOTB) yang tidak memenuhi ketentuan terutama dalam hal higiene dan sanitasi.

Dengan belum tercapainya target persentase Obat Tradisional ini berarti sasaran strategi Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Bali belum optimal mencakup Obat Tradisional. Hal ini disebabkan karena Obat Tradisional yang beredar di Provinsi Bali sebagian besar merupakan produksi dari luar wilayah Provinsi Bali sehingga sulit melakukan intervensi terhadap produsen Obat Tradisional tersebut. BBPOM di Denpasar telah melakukan pembinaan kepada sarana distribusi untuk tidak menjual produk Obat Tradisional yang tidak memenuhi syarat, tidak memiliki ijin edar, merupakan publik warning dan melakukan KIE kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih cerdas untuk tidak mengkonsumsi Obat Tradisional yang tidak memenuhi syarat dan tidak memiliki ijin edar sehingga diharapkan selanjutnya capaian indikator Obat Tradisional yang memenuhi syarat bisa tercapai sesuai dengan target. KIE juga dilakukan kepada pelaku usaha agar mampu mandiri dalam hal memberikan jaminan keamanan dan mutu produknya serta meningkatkan daya saing dipasar lokal maupun pasar global.

Terkait capaian Obat Tradisional sebesar 95%, selanjutnya BBPOM di Denpasar meningkatkan sistem pengawasan terhadap Obat Tradisional melalui beberapa hal antara lain:

- ❖ Dilakukan strategi yang lebih fokus untuk menangani masalah Obat Tradisional melalui penyuluhan dan sosialisasi kepada pelaku usaha Obat Tradisional.
- ❖ Dilakukan koordinasi dengan Balai POM provinsi terkait, untuk tindak lanjut Obat Tradisional yang merupakan produk luar Provinsi Bali.
- ❖ Pengawasan terhadap Obat Tradisional lebih ditingkatkan di daerah pelabuhan / bandara yang merupakan pintu masuk produk-produk dari luar.
- ❖ Memantau dan mengawal tindak lanjut produk yang tidak memenuhi syarat.

- ❖ Meningkatkan penyebaran publik warning terkait Obat Tradisional kepada pelaku usaha dan masyarakat.
- ❖ Lebih meningkatkan kemandirian pelaku usaha Obat Tradisional untuk menjamin mutu dan keamanan produk Obat Tradisional sehingga mampu bersaing di pasar lokal maupun global dengan pembinaan CPOTB dan penyebaran informasi terkait Obat Tradisional.
- ❖ Meningkatkan pembinaan kepada pelaku usaha untuk tidak menjual produk Obat Tradisional yang tidak memenuhi syarat, tidak memiliki ijin edar, merupakan publik warning.
- ❖ Meningkatkan KIE untuk tidak mengkonsumsi Obat Tradisional yang tidak memenuhi syarat dan tidak memiliki ijin edar sehingga diharapkan capaian indikator Obat Tradisional yang memenuhi syarat bisa tercapai sesuai dengan target.
- ❖ Provinsi Bali merupakan daerah potensial untuk pengembangan Obat Asli Indonesia, terutama dengan tersedianya ribuan "lontar usadha" yang merupakan warisan leluhur yang telah dimanfaatkan secara turun menurun, untuk itu kepada produsen Obat tradisional, pemberian informasi dan edukasi perlu terus ditingkatkan agar mengedepankan tanggung jawab moral yaitu melakukan kegiatan produksi dengan mengikuti cara-cara berproduksi yang baik (CPOTB) dan tanggung jawab hukum yaitu dengan melengkapi perijinan yang diperlukan dalam berproduksi sehingga mempunyai daya saing dalam menyambut MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN)

c) Indikator persentase kosmetik yang memenuhi syarat

• Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2015

	Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi	Capaian	Kriteria
3.	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	89,00%	95,33%	107,11%	Memuaskan

- **Perbandingan realisasi kinerja dengan baseline dan target jangka menengah (RPJM) yaitu akhir Renstra tahun 2019 sebagai berikut :**

Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian Baseline	Capaian RPJM
	Baseline	RPJM			
3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	89,00%	93,00%	95,33%	107,11 %	102,5 %

- **Analisis Akuntabilitas Kinerja**

Hasil Pengukuran terhadap indikator Kinerja persentase kosmetik yang memenuhi syarat terlihat bahwa capaian indikator kinerja yaitu sebesar 107,11% dengan kriteria **memuaskan**. Realisasi kinerja Indikator tersebut berdasarkan dengan hasil pengujian sampling kosmetik yang dilakukan diseluruh Provinsi Bali dengan hasil memenuhi syarat sebanyak 1001 sampel (95,33%) dari 1050 sampel.

Persentase hasil pengujian kosmetik yang memenuhi syarat tahun 2014 sebesar 95,77%, jika dibandingkan dengan tahun 2015 terlihat kosmetik yang memenuhi syarat tidak jauh berbeda.

Perbandingan capaian dengan baseline dan target RPJM tahun 2019 menunjukkan bahwa realisasi tahun 2015 sudah melampaui target tahun 2019 dan baseline. Namun, dengan adanya perbedaan prioritas sampling setiap tahun, dan perbedaan trend konsumsi masyarakat setiap tahun maka kemungkinan akan ada fluktuasi capaian di setiap tahun hingga tahun 2019.

Dengan realisasi kinerja persentase kosmetik yang memenuhi syarat sebanyak 95,33% menunjukkan bahwa kosmetik yang beredar di Provinsi Bali cukup aman dan pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM di Provinsi Bali terhadap peredaran kosmetik efektif sehingga dapat melindungi masyarakat dari peredaran kosmetik yang membahayakan kesehatan. Hal ini berarti bahwa sasaran strategi Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan di bidang kosmetika telah dapat tercapai sehingga bisa meningkatkan kesehatan masyarakat. Kegiatan yang telah dilakukan untuk mencapai target kinerja tersebut adalah pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi kosmetika, KIE terhadap masyarakat berupa penyebaran informasi tentang kosmetik yang tidak



Gambar 3.3. Pengujian Kosmetik

memenuhi syarat dan mengandung bahan berbahaya serta sosialisasi produk kosmetik yang merupakan publik warning.

Dengan masih ditemukannya kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan tidak mempunyai ijin edar maka fokus kegiatan yang akan dilakukan oleh BBPOM di Denpasar pada tahun 2016 adalah meningkatkan bimbingan / penyuluhan CPKB kepada produsen kosmetik terutama UMKM Kosmetik, untuk bisa mandiri dalam menjamin mutu dan keamanan produknya sehingga mampu mempunyai daya saing dipasar lokal maupun global dan meningkatkan pembinaan kepada sarana distribusi kosmetik untuk tidak menjual produk kosmetik yang tidak memenuhi syarat ataupun tidak memiliki ijin edar, serta melakukan KIE kepada masyarakat untuk tidak menggunakan kosmetik seperti tersebut diatas. KIE dilakukan melalui penyebaran informasi kepada masyarakat serta meningkatkan koordinasi dengan stakeholder sehingga sistem pengawasan obat dan makanan di bidang kosmetik berbasis risiko lebih ditingkatkan.

d) Indikator Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat

• **Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2015**

Indikator Kinerja		Target 2015	Realisasi	Capaian	Kriteria
4.	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	79,00%	100,00%	127,00%	tidak dapat disimpulkan

• **Perbandingan realisasi kinerja dengan baseline dan target jangka menengah (RPJM) yaitu akhir Renstra tahun 2019 sebagai berikut :**

Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian Baseline	Capaian RPJM	
	Baseline	RPJM				
4.	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	79,00%	83,00%	100,00%	126,58%	120,48%

• **Analisis Akuntabilitas Kinerja**

Hasil pengukuran terhadap indikator kinerja persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat terlihat bahwa capaian indikator kinerja yaitu sebesar 127,00% dengan kriteria **tidak dapat disimpulkan**. Realisasi kinerja indikator tersebut berdasarkan dengan hasil pengujian sampel yang disampling di seluruh Provinsi Bali dari 175 sampel, seluruhnya memenuhi syarat (100%).

Persentase hasil pengujian suplemen kesehatan yang memenuhi syarat tahun 2014 sebesar 99,19%. Jika dibandingkan dengan tahun 2015 terlihat suplemen kesehatan yang memenuhi syarat meningkat. Perbandingan capaian dengan baseline dan target RPJM tahun 2019 menunjukkan bahwa realisasi tahun 2015 sudah melampaui target tahun 2019 dan baseline. Namun, dengan adanya perbedaan prioritas sampling dan peningkatan kemampuan uji setiap tahun, dan perbedaan trend konsumsi masyarakat setiap tahun maka kemungkinan akan ada fluktuasi capaian di setiap tahun hingga tahun 2019. Penetapan baseline saat ini hanya berdasarkan prediksi dan proyeksi data beberapa tahun terakhir. Sebaiknya baseline data dilakukan melalui survey dan diolah secara statistik untuk mengetahui kondisi nyata dari produk suplemen kesehatan yang beredar sehingga penentuan target bisa realistis dan tidak terjadi capaian yang tidak dapat disimpulkan. Upaya yang akan dilakukan adalah Review renstra dalam penentuan target persentase suplemen kesehatan, meningkatkan variasi jenis sampel yang disampling dengan kajian risiko yang lebih tajam, serta penentuan parameter uji yang lebih kritis dan lebih luas dengan antisipasi kemungkinan bahan berbahaya yang ditambahkan pada produk tersebut.

Dengan realisasi persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat sebanyak 100% menunjukkan bahwa suplemen kesehatan yang beredar di Provinsi Bali aman, sistem pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM di Provinsi Bali terhadap peredaran suplemen kesehatan efektif melindungi masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesehatan masyarakat. Dengan capaian kinerja tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa sasaran strategi Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan telah tercapai. Kegiatan yang telah dilakukan untuk mencapai target kinerja tersebut adalah pengawasan terhadap sarana distribusi suplemen kesehatan, KIE terhadap masyarakat berupa penyebaran informasi tentang suplemen kesehatan yang tidak memenuhi syarat dan mengandung bahan berbahaya serta sosialisasi produk suplemen kesehatan yang merupakan publik warning dan tidak memiliki izin edar untuk membuat masyarakat cerdas memilih dan mengkonsumsi suplemen kesehatan. Hal yang perlu dilakukan adalah meningkatkan KIE kepada masyarakat, meningkatkan kompetensi petugas dalam hal pengawasan/pengujian.



Gambar 3.4. Pengujian Suplemen Makanan

e) **Indikator Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Meningkat**

- **Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2015**

Indikator Kinerja		Target 2015	Realisasi	Capaian	Kriteria
5.	Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Meningkat	88,10%	91,78%	104%	Memuaskan

- **Perbandingan realisasi kinerja dengan baseline dan target jangka menengah (RPJM) yaitu akhir Renstra tahun 2019 sebagai berikut :**

Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian Baseline	Capaian RPJM	
	Baseline	RPJM				
5.	Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	88,10%	90,10%	91,78%	104 %	102%

- **Analisis Akuntabilitas Kinerja**

Pengukuran realisasi terhadap target yang telah ditetapkan terhadap indikator persentase Makanan yang memenuhi syarat terlihat bahwa realisasi telah mencapai target yang ditetapkan, dan capaian indikator kinerjanya yaitu sebesar 102% dengan kriteria **memuaskan**. Realisasi kinerja indikator tersebut berdasarkan dengan hasil pengujian sampling Makanan (pangan) yang dilakukan diseluruh Provinsi Bali dengan hasil memenuhi syarat sebanyak 681 sampel (91,78%) dari 742 sampel.

Persentase hasil pengujian Makanan yang memenuhi syarat tahun 2014 sebesar 90,98%. Jika dibandingkan dengan tahun 2015 terlihat pangan yang memenuhi syarat meningkat. Perbandingan capaian dengan baseline dan target RPJM tahun 2019 menunjukkan bahwa realisasi tahun 2015 sudah melampaui target tahun 2019 dan baseline. Namun, dengan adanya perbedaan produk yang disampling setiap tahun, serta perbedaan trend konsumsi masyarakat setiap tahun maka kemungkinan akan ada fluktuasi capaian di setiap tahun hingga tahun 2019. Penetapan baseline saat ini hanya berdasarkan prediksi dan proyeksi data



Gambar 3.5. Pengujian Makanan

beberapa tahun terakhir. Sebaiknya baseline data dilakukan melalui survey untuk mengetahui kondisi nyata dari produk pangan yang beredar sehingga penentuan target bisa realistis.

Jenis sampel yang disampling selain produk dengan nomor ijin edar MD/ML yang dikeluarkan BPOM ada juga sampel dengan nomor ijin edar Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan dan sampel siap saji serta sampel yang kadaluwarsa dibawah 1 (satu) minggu sehingga tidak perlu ijin edar dengan hasil uji memenuhi syarat sebanyak 223 sampel (72.4%) dari 308 sampel. Selain di laboratorium pengujian sampel dilakukan juga melalui mobil laboratorium keliling, terutama untuk produk jajanan anak sekolah dan jajanan pasar yang ada dipasar – pasar, di tempat keramaian seperti pantai, lapangan olah raga, ataupun penjual pangan pada saat bulan puasa, dengan hasil uji sampel yang memenuhi syarat sebanyak 780 sampel (89.55%) dari 871 sampel. Dari data tersebut terlihat bahwa sampel dengan nomor ijin edar yang dikeluarkan BPOM persentase memenuhi syaratnya lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan pangan yang dilakukan Badan POM sudah baik. Produk PIRT dan tidak terdaftar sesuai dengan PP No 28 Tahun 2004 merupakan kewenangan dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dimana BBPOM di Denpasar hanya memiliki kewenangan dalam hal pengawasan dan menyampaikan hasil pengawasan pangan khususnya yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) untuk ditindaklanjuti.

Dengan realisasi kinerja persentase Makanan yang memenuhi syarat sebanyak 91.78% menunjukkan bahwa pangan yang beredar di Provinsi Bali cukup aman dan sistem pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM di Denpasar terhadap peredaran pangan efektif sehingga dapat melindungi masyarakat dari peredaran pangan yang membahayakan kesehatan serta dapat meningkatkan kesehatan masyarakat. Hal ini berarti bahwa sasaran strategi Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan telah dapat tercapai. Kegiatan yang telah dilakukan untuk mencapai target kinerja tersebut adalah pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi pangan, KIE terhadap masyarakat berupa penyebaran informasi tentang pangan yang tidak memenuhi syarat dan mengandung bahan berbahaya serta sosialisasi produk pangan yang merupakan publik warning dan tidak memiliki ijin edar, termasuk melalui program Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD) dengan membentuk kader keamanan pangan untuk membuat masyarakat cerdas memilih dan mengkonsumsi pangan yang sehat sehingga kesehatan masyarakat dapat ditingkatkan. KIE juga dilakukan kepada pelaku usaha agar mampu

mandiri dalam hal memberikan jaminan keamanan dan mutu produknya serta meningkatkan daya saing. Dengan capaian kinerja tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa sasaran peningkatan sistem pengawasan obat dan makanan dinilai sudah efektif melindungi masyarakat di Provinsi Bali sehingga kesehatan masyarakat dapat ditingkatkan.

Fokus kegiatan yang akan dilakukan oleh BBPOM di Denpasar pada tahun 2016 adalah meningkatkan pengawasan, bimbingan / penyuluhan kepada produsen dan sarana distribusi Makanan (Pangan) dan KIE kepada masyarakat agar cerdas dalam memilih Makanan (pangan). Kegiatan KIE dilakukan dengan penyebaran informasi melalui kegiatan talkshow, media cetak, media elektronik serta meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait. KIE juga dilakukan kepada pelaku usaha agar mampu mandiri dalam hal memberikan jaminan keamanan dan mutu produknya serta meningkatkan daya saing.

Dengan capaian masing - masing indikator tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis pertama yaitu Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan tercapai, Obat dan Makanan yang beredar di Provinsi Bali aman dan bermutu sehingga dapat meningkatkan kesehatan masyarakat dan meningkatkan daya saing produk lokal Provinsi Bali

2. Meningkatkan Kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan dan Partisipasi Masyarakat

Untuk sasaran kedua ini, terdapat 2 indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat capaiannya yaitu:

- a) Tingkat kepuasan masyarakat dengan target 80%
- b) Jumlah kabupaten/kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan dengan target 3.

Hasil pengukuran indikator kinerja sasaran strategis kedua terhadap target yang telah ditetapkan pada tahun 2015 yaitu sebagai berikut :

a) Indikator Tingkat Kepuasan Masyarakat

• **Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2015**

Indikator Kinerja		Target 2015	Realisasi	Capaian	Kriteria
1.	Tingkat kepuasan masyarakat	80%	83,87%	104,84%	Memuaskan

• **Perbandingan realisasi kinerja dengan baseline dan target jangka menengah (RPJM) yaitu akhir Renstra tahun 2019 sebagai berikut :**

Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian Baseline	Capaian RPJM	
	Baseline	RPJM				
1.	Tingkat kepuasan masyarakat	80%	82%	83,87%	104,84%	102,28%

• **Analisis Akuntabilitas Kinerja**

Perhitungan indeks kepuasan masyarakat dilakukan dengan cara mengolah data kuisisioner yang diberikan masyarakat/konsumen yang memanfaatkan layanan informasi konsumen dan konsultasi sertifikasi dengan metoda pengukuran indeks kepuasan pelanggan sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi no. KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Institusi Pemerintah. Jumlah data yang digunakan untuk mengukur adalah 84 kuisisioner dilakukan selama tahun 2015. Untuk selanjutnya agar memperoleh data Tingkat Kepuasan Masyarakat yang lebih mewakili akan menggunakan data yang lebih luas, lebih variatif dan melibatkan jumlah masyarakat yang lebih banyak.

Pengukuran realisasi terhadap target yang telah ditetapkan terhadap indikator persentase tingkat kepuasan masyarakat yaitu terlihat bahwa capaian indikator kinerja yaitu sebesar 104,84% dengan kriteria **memuaskan**. Realisasi indikator tersebut telah melebihi target RPJM 2019. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan publik yang dilakukan BBPOM di Denpasar sudah memenuhi harapan masyarakat dan mendukung kemandirian pelaku usaha. Terpenuhinya target Tingkat Kepuasan Masyarakat menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dan kemandirian pelaku usaha meningkat sehingga Obat dan Makanan yang beredar di Provinsi Bali aman, bermutu dan bermanfaat

serta dapat meningkatkan kesehatan masyarakat. Dengan peningkatan partisipasi masyarakat dan koordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya akan meningkatkan daya saing produk lokal.

b) Indikator Jumlah Kabupaten/Kota yang Memberikan Komitmen untuk Pelaksanaan Pengawasan Obat dan Makanan dengan Memberikan Alokasi Anggaran Pelaksanaan Regulasi Obat dan Makanan.

- **Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2015**

Indikator Kinerja	Target			Realisasi	Capaian	Kriteria
	2015	Baseline	2019			
2. Jumlah kabupaten/kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	3	3	7	3	100%	Memuaskan

- **Perbandingan realisasi kinerja dengan baseline dan target jangka menengah (RPJM) yaitu akhir Renstra tahun 2019 sebagai berikut :**

Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian Baseline	Capaian RPJMN
	Baseline	RPJM			
2. Jumlah kabupaten/kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	3	7	3	100%	42,86%

- **Analisis Akuntabilitas Kinerja**

Pengukuran realisasi terhadap target yang telah ditetapkan terhadap indikator jumlah kabupaten/kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan terlihat bahwa realisasi telah mencapai target yang ditetapkan, dan capaian

indikator kinerjanya yaitu sebesar 100% dengan kriteria **memuaskan**. Realisasi kinerja indikator tersebut berdasarkan jumlah Kabupaten/Kota yang telah mengalokasikan anggaran untuk pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerjanya yaitu Kabupaten Badung, Gianyar dan Tabanan.

Jika dibandingkan dengan tahun 2014 ada peningkatan Kabupaten / Kota yang mengalokasikan anggarannya untuk kegiatan pengawasan Obat dan Makanan dan jika dibandingkan dengan target RPJM 2019 capaiannya sudah 42,86%. Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pada pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan menunjukkan bahwa kemitraan dengan pemangku kepentingan sudah berjalan baik, sehingga dapat berpartisipasi dan saling mendukung dalam pengawasan Obat dan Makanan terutama yang menjadi tugas dan fungsi masing – masing institusi sesuai PP 28 tahun 2004, yang berdampak Obat dan Makanan yang beredar di Provinsi Bali aman, bermutu serta bermanfaat dan dapat meningkatkan kesehatan masyarakat. Dengan komitmen tersebut diatas diharapkan pula dapat meningkatkan kemandirian pelaku usaha terutama pelaku usaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di bidang Pangan, Obat Tradisional dan Kosmetika yang merupakan usaha mayoritas di Provinsi Bali sehingga mampu menghasilkan produk Obat dan Makanan yang memenuhi standar dan mempunyai daya saing.

Capaian kedua Indikator tersebut diatas dengan kriteria memuaskan menunjukkan bahwa sasaran strategis Meningkatkan Kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan dan Partisipasi Masyarakat bisa tercapai secara optimal.

3. Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM

Untuk sasaran ketiga ini, terdapat 1 indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat capaiannya yaitu: Nilai SAKIP BBPOM di Denpasar oleh Badan POM RI

Hasil pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran strategis ketiga terhadap target yang telah ditetapkan pada tahun 2015 yaitu sebagai berikut :

- **Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2015**

Indikator Kinerja		Target 2015	Realisasi	Capaian	Kriteria
1.	Nilai SAKIP BBPOM di Denpasar oleh Badan POM RI	A (80%-90%)	B (67,99%)	84,99%	Cukup

- **Perbandingan realisasi kinerja dengan baseline dan target jangka menengah (RPJM) yaitu akhir Renstra tahun 2019 sebagai berikut :**

Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian Baseline	Capaian RPJM
	Baseline	RPJM			
1. Nilai SAKIP BBPOM di Denpasar oleh Badan POM RI	A (80%-90%)	A (80%-90%)	B (67,99%)	84,99%	84,99%

- **Analisis Akuntabilitas Kinerja**

Pengukuran realisasi terhadap target yang telah ditetapkan terhadap indikator Nilai SAKIP BBPOM di Denpasar oleh Badan POM RI yaitu terlihat realisasi nilai 67,99% (**B**) dengan capaian 84,99% dengan kategori **cukup**. Salah satu penyebab capaian indikator kinerja tersebut tidak tercapai karena pelaporan kinerja/SAKIP yang dibuat belum sesuai dengan kriteria yang tertuang dalam Permenpan RB No.53 Tahun 2014. Untuk selanjutnya pelaporan kinerja / SAKIP akan dibuat sesuai Permenpan tersebut dan juknis penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan POM.

Dengan kategori capaian indikator nilai SAKIP BBPOM di Denpasar cukup maka kualitas kapasitas kelembagaan BBPOM di Denpasar perlu terus ditingkatkan antara lain dengan meningkatkan kualitas kinerja dan tetap mempertahankan sistem manajemen mutu sesuai ISO 9001 serta ISO/IEC 17025 untuk penyelenggaraan sistem mutu laboratorium pengujian. Disamping itu budaya organisasi, implementasi SPIP (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah) dan komitmen pelaksanaan Reformasi Birokrasi juga harus terus ditingkatkan implementasinya sehingga kualitas dan kapasitas kelembagaan BBPOM di Denpasar meningkat untuk menunjang peningkatan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan.

Berdasarkan pengukuran seluruh indikator Sasaran strategis diatas dapat disimpulkan :

- 5 indikator memuaskan
- 1 indikator baik
- 1 indikator tidak dapat disimpulkan dan
- 1 indikator bernilai cukup.

A.2. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan

Hasil pengukuran terhadap indikator sasaran kegiatan tahun 2015, dari 9 indikator sasaran yang ditetapkan, seluruh indikator capaiannya 100% atau lebih.

Di bawah ini diuraikan masing-masing sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk Obat dan Makanan yang beredar

Untuk sasaran pertama ini, terdapat 2 indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat capaiannya yaitu:

- a) Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis dengan target 3.500 sampel.
- b) Pemenuhan target sampling produk obat disektor publik (IFK) dengan target 100%.

Hasil pencapaian realisasi indikator kinerja terhadap target yang telah ditetapkan pada tahun 2015 yaitu sebagai berikut :

a) Indikator jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis

- Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2015

	Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi	Capaian	Kriteria
1.	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	3.500	3.500	100%	Memuaskan

- **Perbandingan realisasi kinerja dengan baseline dan target jangka menengah (RPJM) yaitu akhir Renstra tahun 2019 sebagai berikut :**

Indikator Kinerja		Target		Realisasi	Capaian Baseline	Capaian RPJM
		Baseline	RPJM			
1.	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	3.500	3.500	3.500	100%	100%

- **Analisis Akuntabilitas Kinerja**

Sampel diuji menggunakan parameter kritis sesuai dengan pedoman prioritas sampling. Parameter kritis adalah parameter uji yang bersifat sebagai penentu terhadap jaminan keamanan, manfaat, dan mutu produk yang diuji.

Realisasi terhadap indikator jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis adalah 3500 dengan capaian indikator kinerja sebesar 100% yang memiliki kriteria **memuaskan**. Jumlah sampel yang disampling dan diuji pada tahun 2015 sama dengan tahun 2014, perbedaannya hanya pada parameter uji dimana pada tahun 2015 lebih menekankan pada parameter kritis. Sampai dengan akhir RPJM jumlah sampel yang disampling tiap tahun sama sebanyak 3500 dengan parameter uji kritis dan sesuai dengan prioritas sampling. Kemampuan uji parameter kritis didukung oleh verifikasi metode, kompetensi SDM dan peralatan yang dimiliki. Tercapainya indikator tersebut berarti bahwa sasaran meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk Obat dan Makanan yang beredar tercapai sehingga jaminan keamanan produk Obat dan Makanan meningkat dan masyarakat di wilayah Provinsi Bali terlindungi dari Obat dan Makanan yang beresiko terhadap kesehatan. Untuk lebih mewakili produk yang beredar, variasi sampel yang disampling lebih diperluas dengan mempertimbangkan Obat dan Makanan yang beresiko terhadap kesehatan masyarakat dan untuk meningkatkan kemampuan terhadap uji parameter kritis dilakukan pelatihan secara berkelanjutan sehingga jaminan produk Obat dan Makanan aman dapat ditingkatkan.



Gambar 3.6 Pengujian dengan parameter kritis

b) Indikator Pemenuhan target sampling produk obat disektor publik

- **Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2015**

Indikator Kinerja		Target 2015	Realisasi	Capaian	Kriteria
2.	Pemenuhan target sampling produk obat disektor publik (IFK)	100%	100%	100%	Memuaskan

- **Perbandingan realisasi kinerja dengan baseline dan target jangka menengah (RPJM) yaitu akhir Renstra tahun 2019 sebagai berikut :**

Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian Baseline	Capaian RPJM
	Baseline	RPJM			
2.	Pemenuhan target sampling produk obat disektor publik (IFK)	100%	100%	100%	100%

- **Analisis Akuntabilitas Kinerja**

Jumlah sampel yang disampling di sektor publik dihitung berdasarkan jumlah sampel yang diambil pada IFK (Instalasi Farmasi Kabupaten) dibandingkan dengan target sampel yang harus disampling di IFK. Jumlah sampel yang disampling sebanyak 75 sampel dari sarana 5 sarana IFK. Realisasi terhadap indikator pemenuhan target sampling produk obat disektor publik (IFK) adalah 100% dengan capaian sebesar 100% dan kriteria **memuaskan**. Jumlah sampel yang disampling tiap tahun sampai dengan akhir RPJM tahun 2019 di IFK sama, tetapi jenis sampel yang disampling berbeda tergantung pada pedoman prioritas sampling pada tahun berjalan. Dengan capaian indikator pemenuhan target sampling produk obat disektor publik (IFK) 100% menunjukkan bahwa pengambilan sampel disektor publik dapat meningkatkan kualitas sampling dan pengujian terhadap Obat dan Makanan yang beredar sesuai dengan sasaran kegiatan 1 (satu) sehingga sistem pengawasan Obat dan Makanan efektif untuk melindungi dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa sasaran strategis satu (1) menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan tercapai. Upaya yang akan dilakukan adalah lebih meningkatkan variasi jenis sampel yang disampling agar lebih mewakili produk di sarana IFK dan meningkatkan kompetensi personel penguji sehingga meningkatkan parameter uji kritis yang dilakukan.

2. Meningkatnya Kualitas Sarana Produksi yang Memenuhi Standar

Untuk sasaran kegiatan kedua ini, terdapat 1 indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat capaiannya yaitu: persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan

Hasil pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran kegiatan kedua terhadap target yang telah ditetapkan pada tahun 2015 yaitu sebagai berikut :

- **Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2015**

Indikator Kinerja		Target 2015	Realisasi	Capaian	Kriteria
1.	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	25%	30%	120%	Memuaskan

- **Perbandingan realisasi kinerja dengan baseline dan target jangka menengah (RPJM) yaitu akhir Renstra tahun 2019 sebagai berikut :**

Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian Baseline	Capaian RPJM	
	Baseline	RPJM				
1.	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	24,63%	25%	30%	121,80%	120%

- **Analisis Akuntabilitas Kinerja**

Pengukuran realisasi terhadap target yang telah ditetapkan terhadap indikator persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan yaitu terlihat bahwa capaian indikator kinerja yaitu sebesar 120% dengan kriteria **memuaskan**. Pemeriksaan sarana produksi meliputi pemeriksaan sarana produksi kosmetik, Obat Tradisional, dan Pangan pada tahun 2015 telah diperiksa sebanyak 202 sarana dari 671 jumlah sarana yang ada di Provinsi Bali. Realisasi



Gambar 3.7 Pengawasan Sarana Produksi

indikator tersebut dibandingkan dengan baseline dan RPJM tahun 2019 sudah melebihi 100%. Dilihat dari jumlah angka ini relatif kecil namun misi melindungi kesehatan masyarakat dari peredaran produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi persyaratan harus terus ditingkatkan dengan strategi meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan baik melalui pembinaan, pengawasan ataupun penindakan sarana produksi yang tidak memenuhi ketentuan. Untuk itu telah dilakukan penetapan prioritas terhadap sarana-sarana yang harus diperiksa. Pemeriksaan diarahkan kepada sarana yang terdapat temuan pada pemeriksaan tahun sebelumnya dan sarana yang belum pernah dilakukan pemeriksaan. Dengan cara ini diharapkan pengawasan dapat merata dan misi mendorong kemandirian pelaku usaha dalam menjamin keamanan produk yang dihasilkan dapat tercapai, sehingga Obat dan Makanan yang beredar di Provinsi Bali dapat meningkatkan kesehatan masyarakat.

Dengan tercapainya persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan sebanyak 120% menunjukkan bahwakwalitas sarana produksi dapat ditingkatkan dan sasaran program menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Bali sudah efektif melindungi masyarakat. Upaya yang akan dilakukan adalah melakukan pemeriksaan yang komprehensif dan memonitor CAPA sarana-sarana TMK tahun sebelumnya serta melakukan koordinasi dengan bidang Serlik untuk melakukan pembinaan pada sarana tersebut. Untuk produsen yang hasil pengujian sampelnya tidak memenuhi syarat akan dilakukan pengawasan dan pembinaan seperti kasus diatas.

3. Meningkatnya Kualitas Sarana Distribusi yang Memenuhi Standar

Untuk sasaran Kegiatan/program ketiga ini, terdapat 1 indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat capaiannya yaitu: Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan

Hasil pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran kinerja kedua terhadap target yang telah ditetapkan pada tahun 2015 yaitu sebagai berikut :

- **Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2015**

	Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi	Capaian	Kriteria
1.	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	24%	27%	113%	Memuaskan

- **Perbandingan realisasi kinerja dengan baseline dan target jangka menengah (RPJM) yaitu akhir Renstra tahun 2019 sebagai berikut :**

	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian Baseline	Capaian RPJM
		Baseline	RPJM			
1.	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	24%	25%	27%	113%	108%

- **Analisis Akuntabilitas Kinerja**

Pengukuran realisasi terhadap target yang telah ditetapkan terhadap indikator persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan yaitu terlihat bahwa capaian indikator kinerja yaitu sebesar 113 % dengan kriteria **memuaskan**. Pemeriksaan sarana distribusi meliputi pemeriksaan sarana distribusi produk terapeutic, kosmetik, obat tradisional, suplemen kesehatan dan sarana distribusi/pelayanan narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan berbahaya serta sarana distribusi pangan pada tahun 2015 telah diperiksa sebanyak 872 sarana dari 3181 jumlah sarana yang ada di Provinsi Bali. Realisasi indikator tersebut dibandingkan dengan baseline dan RPJM tahun 2019 sudah melebihi 100%. Dilihat dari jumlah angka ini relatif kecil namun misi melindungi kesehatan masyarakat dari peredaran produk Obat dan Makanan yang tidak

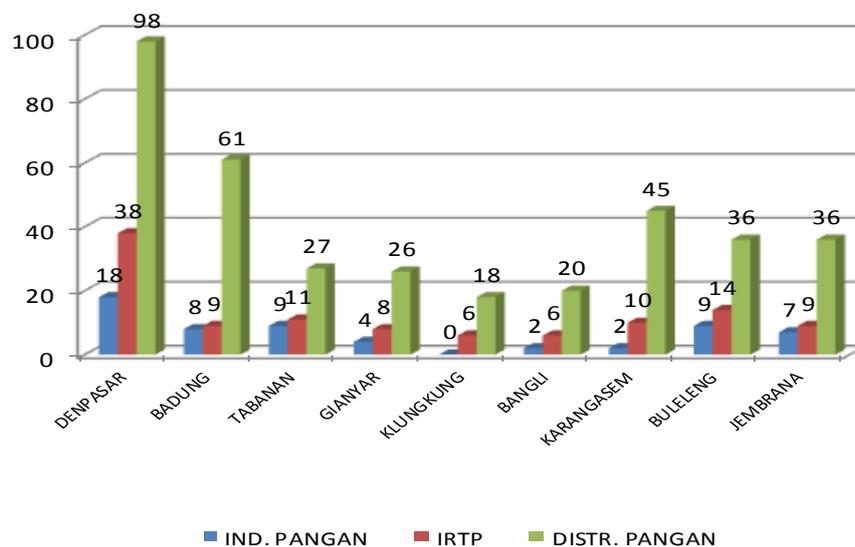


Gambar 3.8. Pengawasan Sarana Distribusi

memenuhi persyaratan harus terus ditingkatkan dengan strategi meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan baik melalui pembinaan, pengawasan ataupun penindakan sarana distribusi yang tidak memenuhi ketentuan. Untuk itu telah dilakukan penetapan prioritas terhadap sarana-sarana yang harus diperiksa. Pemeriksaan diarahkan kepada sarana yang terdapat temuan pada pemeriksaan tahun sebelumnya dan sarana yang belum pernah dilakukan pemeriksaan. Dengan cara ini diharapkan pengawasan dapat merata dan target pengawasan jangka panjang serta misi pembinaan dan pengawasan dapat tercapai sehingga Obat dan Makanan yang beredar di Provinsi Bali dapat terjaga keamanannya dan dapat meningkatkan kesehatan masyarakat.

Hal ini berarti bahwa sasaran kegiatan meningkatkan kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar telah dapat tercapai. Dengan tercapainya persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan sebanyak 113 % menunjukkan bahwa sasaran program menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Bali sudah efektif melindungi masyarakat.

Upaya yang akan dilakukan adalah meningkatkan pembinaan terhadap sarana distribusi melalui sosialisasi Cara distribusi Obat dan Makanan yang baik dan sosialisasi peraturan termutakhir tentang Obat dan makanan. Sosialisasi ataupun penyebaran publik warning sehingga tidak mendistribusikan produk yang termasuk publik warning.



Gambar 3.9. Sebaran Kegiatan Pengawasan terhadap Sarana Produksi dan Sarana Distribusi Pangan

4. Meningkatnya Hasil Tindak Lanjut Penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan

Untuk sasaran keempat ini, terdapat 1 indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat capaiannya yaitu: Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan

Hasil pencapaian realisasi terhadap target yang telah ditetapkan pada tahun 2015 yaitu sebagai berikut :

- **Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2015**

	Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi	Capaian	Kriteria
1.	Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	9	9	100%	Memuaskan

- **Perbandingan realisasi kinerja dengan baseline dan target jangka menengah (RPJM) yaitu akhir Renstra tahun 2019 sebagai berikut :**

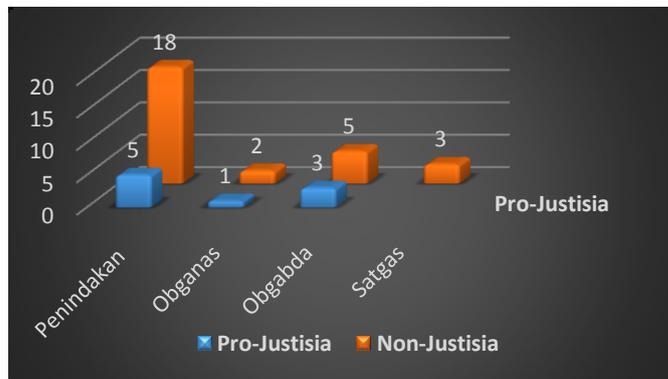
	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian Baseline	Capaian RPJM
		Baseline	RPJM			
1.	Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	9	49	9	100%	18,37%

- **Analisis Akuntabilitas Kinerja**

Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan tahun 2015 sebanyak 9 perkara dari 28 kasus yang ditemukan dengan nilai barang bukti yang diamankan sebesar Rp.666.161.900 dengan rincian Pro-Justisia sebesar Rp. 327.526.000 dan temuan kasus sebesar Rp. 338.635.900.

Capaian pengukuran realisasi kinerja indikator jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan sebesar 100% dengan kriteria **memuaskan**. Realisasi indikator tersebut dibandingkan dengan akhir RPJM tahun 2019 sudah mencapai 18,37%. Hal ini berarti bahwa sasaran strategi meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan telah dapat tercapai. Dengan tercapainya jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan 100% menunjukkan bahwa sistem pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Bali semakin baik sehingga Obat dan Makanan aman, bermutu dan bermanfaat untuk melindungi masyarakat.

Upaya yang dilakukan adalah meningkatkan kompetensi petugas dalam hal melakukan penyelidikan sehingga kasus yang ada dimasyarakat dapat dituntaskan sampai ke akar masalahnya.



Gambar 3.10. Tindak Lanjut Penyidikan Obat dan Makanan

“Analisis Hasil Pengukuran Kegiatan”

Untuk mencapai Keempat Sasaran Kegiatan tersebut diatas telah ditetapkan 94 sub kegiatan dan telah dilaksanakan seluruhnya dengan hasil 90 (95,74 %) sub kegiatan efisien dan 4 (4,26%) sub kegiatan tidak efisien sesuai dengan lampiran 4. Pengukuran Efisiensi Kegiatan.

5. Meningkatnya Kerjasama, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi

Untuk sasaran kelima ini, terdapat 2 indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat capaiannya yaitu:

- a) Jumlah layanan publik BBPOM di Denpasar
- b) Jumlah komunitas yang diberdayakan

Hasil pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran kinerja kelima terhadap target yang telah ditetapkan pada tahun 2015 yaitu sebagai berikut :

a) Indikator jumlah layanan publik BB/BPOM

• **Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2015**

Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi	Capaian	Kriteria
1. Jumlah layanan publik BBPOM di Denpasar	1.145	1.546	135%	Tidak dapat disimpulkan

• **Perbandingan realisasi kinerja dengan baseline dan target jangka menengah (RPJM) yaitu akhir Renstra tahun 2019 sebagai berikut :**

Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian Baseline	Capaian RPJM
	Baseline	RPJM			
1. Jumlah layanan publik BBPOM di Denpasar	957	5.945	1.546	161,54%	26,01%

• **Analisis Akuntabilitas Kinerja**

Jumlah Layanan Publik dihitung berdasarkan jumlah layanan di Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK), Surat Keterangan Impor/Surat Keterangan Ekspor (SKI/SKE), Audit registrasi, Pameran, Penyebaran Informasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE), Mobil Laboratorium Keliling (Mobling) dan Uji sampel pihak ketiga.

Pengukuran realisasi terhadap target yang telah ditetapkan terhadap indikator Jumlah Layanan Publik Balai Besar POM di Denpasar terlihat bahwa capaian indikator kinerja yaitu sebesar 135% dengan kriteria tidak dapat disimpulkan. Hal ini disebabkan karena :

- Peningkatan Anggaran Balai untuk layanan publik tidak sebanding dengan peningkatan target pada Renstra.
- Beberapa kegiatan layanan seperti ULPK, penerbitan SKI/SKE, audit sarana dalam rangka registrasi dan permintaan uji sampel pihak ketiga bersifat pasif yang bisa meningkat atau menurun sesuai dengan permintaan masyarakat dan pada tahun 2015 terjadi peningkatan sehingga jauh melampaui target.

Upaya yang akan dilakukan adalah Review renstra dalam penentuan target jumlah layanan publik dan lebih meningkatkan layanan dalam hal ketepatan waktu, kejelasan prosedur dan informasi, kenyamanan tempat pelayanan serta lebih meningkatkan kemampuan SDM dalam pelayanan publik melalui pelatihan kehumasan, motivasi spiritual sehingga timbul paradigma melayani dengan hati.

Realisasi indikator tersebut dibandingkan dengan target akhir RPJM tahun 2019 sudah mencapai 26,01%. Capaian yang melampaui target ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap BPOM sudah sangat tinggi karena peningkatan layanan KIE melalui media sosial, media cetak/elektronik, penyebaran leaflet/brosur, mobil laboratorium keliling serta penyebaran informasi produk Obat dan Makanan melalui iklan antara lain iklan layanan masyarakat tentang Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), iklan layanan masyarakat tentang Gerakan Nasional Waspada Obat dan Makanan Ilegal (GN-WOMI), iklan layanan masyarakat tentang Obat Tradisional, iklan layanan masyarakat tentang Kosmetik, iklan keamanan pangan. Sasaran kegiatan meningkatnya kerja sama, komunikasi, Informasi dan Edukasi serta Sasaran Strategis Meningkatnya Kemandirian Pelaku Usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat tercapai sehingga dapat meningkatkan kesehatan masyarakat.



Gambar 3.11 Unit Layanan Pengaduan Konsumen

b) Indikator Jumlah Komunitas yang Diberdayakan

- Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2015

	Indikator Kinerja	Target 2015	Realisasi	Capaian	Kriteria
2.	Jumlah komunitas yang diberdayakan	17	17	100%	Baik

- **Perbandingan realisasi kinerja dengan baseline dan target jangka menengah (RPJM) yaitu akhir Renstra tahun 2019 sebagai berikut :**

Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian Baseline	Capaian RPJM
	Baseline	RPJM			
2. Jumlah komunitas yang diberdayakan	10	29	17	170%	58,62%

- **Analisis Akuntabilitas Kinerja**

Jumlah komunitas yang diberdayakan dihitung berdasarkan jumlah desa dan pasar yang diberikan intervensi keamanan pangan. Pengukuran realisasi terhadap target indikator jumlah komunitas yang diberdayakan di bidang Obat dan Makanan, terlihat bahwa capaian indikator kinerja yaitu sebesar 100% dengan kriteria **memuaskan**. Realisasi indikator tersebut dibandingkan dengan target akhir RPJM tahun 2019 sudah mencapai 58,62%. Dengan realisasi jumlah komunitas yang diberdayakan 100% menunjukkan bahwa penyebaran informasi keamanan pangan yang dilakukan di pasar tradisional dan program GKPD berhasil membentuk Kader Keamanan Pangan yang berperan memberikan informasi kepada masyarakat sampai ke pelosok desa dan masyarakat menjadi lebih cerdas dalam memilih dan mengonsumsi produk pangan yang aman, bermutu dan bermanfaat sehingga dapat meningkatkan kesehatan masyarakat .Hal ini berarti bahwa sasaran kegiatan meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi, dan edukasi dan sasaran strategis meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat telah tercapai.



Gambar 3.12 GKPD

Upaya yang akan dilakukan adalah meningkatkan penyebaran informasi keamanan pangan yang dilakukan di pasar tradisional dan meningkatkan serta mengefektifkan program GKPD sehingga Kader Keamanan Pangan yang dibentuk benar – benar mampu berperan memberikan informasi kepada masyarakat sampai ke pelosok desa dan masyarakat menjadi lebih cerdas dalam memilih dan mengonsumsi produk pangan yang aman, bermutu dan bermanfaat. Kerjasama, komunikasi, informasi, dan edukasikepada masyarakat , pelaku usaha juga akan ditingkatnya untuk mencapai

kemandirian pelaku usaha. Kemitraan dengan pemangku kepentingan juga akan terus ditingkatkan dalam segala lini dan dalam tiap moment pengawasan Obat dan Makanan.

“Analisis Hasil Pengukuran”

Untuk mencapai Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kerjasama, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi telah ditetapkan 17 sub kegiatan dan telah dilaksanakan dengan hasil 15 (88,23%) efisien dan 2 (11,77%) tidak efisien sesuai dengan lampiran 4. Pengukuran Efisiensi Kegiatan

6. Pengadaan Sarana dan Prasarana yang terkait Pengawasan Obat dan Makanan

Untuk sasaran keenam ini, terdapat 1 indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat capaiannya yaitu: Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar

Hasil pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran kinerja keenam terhadap target yang telah ditetapkan pada tahun 2015 yaitu sebagai berikut :

- **Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2015**

Indikator Kinerja		Target 2015	Realisasi	Capaian	Kriteria
1.	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	70%	76,05%	108,63%	Memuaskan

- **Perbandingan realisasi kinerja dengan baseline dan target jangka menengah (RPJM) yaitu akhir Renstra tahun 2019 sebagai berikut :**

Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian Baseline	Capaian 2019	
	Baseline	2019				
1.	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	66%	88%	76,05%	115,21	86,41

- **Analisis Akuntabilitas Kinerja**

Pengukuran realisasi terhadap target yang telah ditetapkan pada indikator persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar yaitu terlihat bahwa capaian indikator kinerja sebesar 108,63% dengan kriteria **memuaskan**. Realisasi kinerja Indikator tersebut dihitung berdasarkan pemenuhan sarana dan prasarana meubelair, alat

pengolah data dan alat laboratorium yang sesuai dengan laporan BMN dibandingkan dengan standar yang ditetapkan. Pemenuhan sarana alat laboratorium 80,89 % sedangkan pemenuhan sarana mebeulair dan alat pengolah data 71,2 %

Dibandingkan dengan tahun 2014 terjadi peningkatan jumlah, jenis sarana dan prasarana yang dimiliki. Mengacu pada target RPJM tahun 2019 capaian 2015 baru mencapai sebesar 86,41%.

Dengan terpenuhinya sarana dan prasarana maka kegiatan pengawas Obat dan Makanan dapat lebih optimal sehingga mendukung peningkatan pencapaian kesehatan masyarakat. Upaya yang akan dilakukan adalah setiap tahun akan melengkapi sarana prasarana sehingga lebih kuat dalam mendukung peningkatan sistem pengawasan obat dan makanan. Penentuan sarana prasarana dilakukan dengan sistem prioritas, mengingat anggaran yang ada terbatas

7. Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Evaluasi yang Dilaporkan Tepat Waktu

Untuk sasaran ketujuh ini, terdapat 1 indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat capaiannya yaitu: jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu.

Hasil pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran kinerja ketujuh terhadap target yang telah ditetapkan pada tahun 2015 yaitu sebagai berikut :

- **Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2015**

Indikator Kinerja		Target 2015	Realisasi	Capaian	Kriteria
1.	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang Dilaporkan Tepat Waktu.	10	10	100%	Memuaskan

- **Perbandingan realisasi kinerja dengan baseline dan target jangka menengah (RPJM) yaitu akhir Renstra tahun 2019 sebagai berikut :**

Indikator Kinerja		Target		Realisasi	Capaian Baseline	Capaian 2019
		Baseline	2019			
1.	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang Dilaporkan Tepat Waktu.	8	10	10	125%	100%

- **Analisis Akuntabilitas Kinerja**

Hasil pengukuran terhadap indikator kinerja Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang Dilaporkan Tepat Waktu terlihat bahwa capaian indikator kinerja yaitu sebesar 100% dengan kriteria memuaskan. Realisasi kinerja Indikator tersebut berdasarkan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dihasilkan meliputi dokumen berikut:

- Renstra 2015 -2019
- Perjanjian Kinerja tahun 2015
- RKAKL/DIPA tahun 2016
- Laporan Kinerja tahun 2014,
- Laporan triwulanan I Tahun 2015
- Laporan triwulanan II Tahun 2015
- Laporan triwulanan III Tahun 2015
- LAPTAH tahun 2014,
- Laporan keuangan tahun 2014,
- Laporan Keuangan Semester 1 tahun 2015,

Hal ini berarti bahwa sasaran strategis Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang Dilaporkan Tepat Waktu telah tercapai. Dengan tercapainya jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu 100% menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaporan yang dibuat untuk mendukung pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Provinsi Bali optimal. Kinerja indikator tersebut tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena setiap tahun jenis target/dokumen yang dihasilkan berbeda. Ketepatan waktu penyampaian laporan

merupakan fokus yang tetap diterapkan untuk tahun berikutnya. Upaya yang akan dilakukan adalah Ketepatan waktu penyampaian laporan dan keakuratan merupakan fokus yang tetap diterapkan untuk tahun berikutnya.

“Analisis Hasil Capaian Kinerja Efisiensi Kegiatan ”

Untuk mencapai Sasaran Kegiatan diatas telah ditetapkan 44 sub kegiatan dan telah dilaksanakan dengan hasil 43 (97,73 %) efisien dan 1 (2,27%) tidak efisien sesuai dengan lampiran 4. Pengukuran Efisiensi Kegiatan.

1. Analisis Hasil Pengukuran

Berdasarkan Pengukuran dan Evaluasi Kinerja yang dilakukan, secara garis besar diperoleh capaian kinerja sebagai berikut:

- ❖ BBPOM di Denpasar telah mewujudkan 3 sasaran strategis dan 7 sasaran kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2015-2019 .
- ❖ Selama Tahun 2015, dari 155 sub kegiatan telah dilaksanakan dengan hasil 148 (95,48%) dilaksanakan dengan efisien dan 7 (4,52%) tidak efisien.

Pencapaian kinerja tersebut diatas menunjukkan bahwa hampir seluruh kegiatan BBPOM di Denpasar pada Tahun 2015 telah dapat direalisasikan sesuai dengan target yang ditetapkan. Namun demikian, masih terdapat beberapa kegiatan yang dikategorikan tidak efisien. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurang optimalnya perencanaan kegiatan.

Terkait dengan capaian kinerja tersebut, BBPOM di Denpasar secara terus - menerus berupaya melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Upaya perbaikan yang dilakukan antara lain:

- ❖ Meningkatkan kompetensi dan kapabilitas SDM BBPOM di Denpasar melalui pendidikan dan pelatihan.
- ❖ Meningkatkan intensitas dan kualitas monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan serta pengelolaan anggaran dan kegiatan.

- ❖ Menambah jumlah SDM karena beban kerja yang terus meningkat serta kemajuan ilmu dan teknologi yang begitu pesat.
- ❖ Memperkuat jejaring kerja dengan lintas sektor terkait.
- ❖ Meningkatkan koordinasi dengan Badan POM.
- ❖ Membuat sinkronisasi jadwal kegiatan antar bidang/sub bagian.
- ❖ Melakukan evaluasi secara rutin terhadap target dalam rangka meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

2. Analisis Atas Efisiensi Sumber Daya

➤ EFISIENSI

Selama Tahun 2015, dari 155 sub kegiatan BBPOM di Denpasar telah dilaksanakan, 148 (95,48%) efisien dan 7 (4,52%) tidak efisien. Secara terinci hasil pengukuran efisiensi kegiatan terlihat yang dilaksanakan dalam Lampiran 4.

Dari pengukuran efisiensi kegiatan terdapat 7 kegiatan yang masuk dalam kategori tidak efisien yang dijelaskan sbb:

Tabel 3.2 Kegiatan Tidak Efisien Tahun 2015

NO	NAMA KEGIATAN	KETERANGAN
1	Gelar Perkara	Sembilan paket gelar perkara hanya direalisasikan sebanyak 4 paket, karena perkara-perkara yang ditangani dapat diselesaikan tanpa dilakukan gelar perkara hanya dilakukan gelar kasus karena perkara sudah dapat dituntaskan, input lebih besar dari output karena anggaran koordinasi masuk di kegiatan gelar perkara.
2	Advokasi dengan Penegak Hukum	11 paket perjalanan hanya terealisasi 8 paket, dimana kegiatan advokasi dalam kota hanya terealisasi 3 paket perjalanan dari 6 paket yang dianggarkan
3	Peningkatan Kemampuan UKOT dan UMOT	Kegiatan ini adalah kegiatan bersama dengan Pusat, yang tidak jadi dilaksanakan.

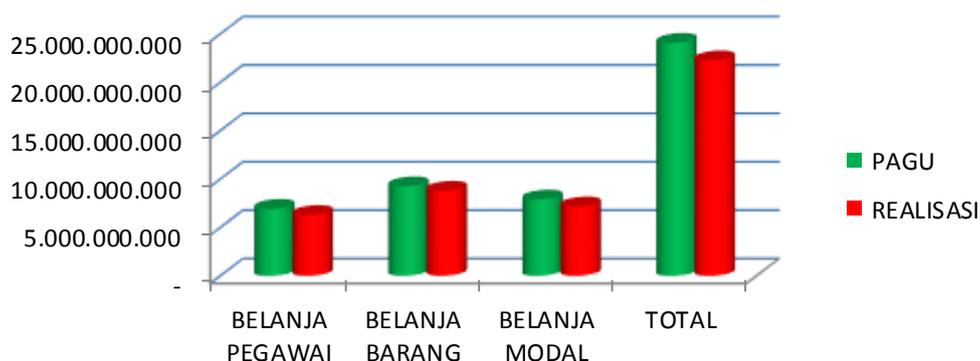
4	Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan oleh Petugas Balai (di Luar Kota) di Provinsi Bali (140 Sarana)	Revisi anggaran/perpindahan anggaran dari Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan oleh Petugas Balai (Luar Kota) di Provinsi Bali ke Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan oleh Petugas Balai (Dalam Kota) di Provinsi Bali, namun jumlah target sarana tidak direvisi.
5	Focus Group Discussion	Perencanaan jumlah peserta yang mengikuti FGD sebanyak 40 orang namun realisasi pelaksanaan kegiatan jumlah peserta 36 orang karena ada 4 orang peserta dari lintas sektor tidak hadir.
6	Pengawasan Industri Garam	Pada saat pengawasan ada sarana yang tidak beroperasi.
7	Sosialisasi Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Kepegawaian oleh BKN	Tidak semua pegawai BBPOM di Denpasar dapat mengikuti kegiatan tersebut. Hal ini diakibatkan oleh adanya kegiatan di Bidang lain yang sama waktu pelaksanaannya. Selain itu juga disebabkan karena melibatkan lintas sektor yaitu Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional X sehingga waktu penyelenggaraan kegiatan tidak begitu lama.

B. REALISASI ANGGARAN

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Laporan Akuntabilitas Keuangan secara lengkap dan rinci dipertanggungjawabkan melalui Laporan Keuangan, berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) BBPOM di Denpasar tahun 2015.

Anggaran BBPOM di Denpasar pada tahun 2015 sebesar Rp 24.079.267.000 yang meliputi Belanja Pegawai Rp 6.928.783.000, Belanja Barang Rp 9.258.639.000 serta Belanja Modal Rp 7.891.845.000. Sedangkan realisasinya adalah Rp 22.273.867.088 (92,50%) yang terdiri dari Belanja Pegawai Rp 6.294.919.881 (90,85%), Belanja Barang Rp 8.800.031.433 (95,05%) serta Belanja Modal Rp 7.178.915.774 (90,97%).

Pagu Anggaran BBPOM di Denpasar tahun 2015 dan realisasinya seperti diagram berikut ini:



Gambar 3.13 Diagram Realisasi Anggaran

Apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran BBPOM di Denpasar pada tahun 2014 dengan pagu sebesar Rp. 19.420.361.000 yang meliputi Belanja Pegawai Rp. 9.674.351.000, Belanja Barang Rp. 9.194.100.000, serta Belanja Modal Rp. 551.910.000. Sedangkan realisasinya adalah Rp. 18.347.497.337 (94,48%) yang terdiri dari Belanja Pegawai Rp. 9.201.552.415 (95,11%), Belanja Barang Rp 8.627.774.222 (93,84%), serta Belanja Modal Rp 518.170.700 (93,89%).

Persentase realisasi anggaran tahun 2015 lebih kecil dibandingkan persentase realisasi anggaran tahun 2014. Hal ini terjadi karena sisa anggaran untuk optimalisasi tidak bisa dimanfaatkan dan terbatasnya waktu di akhir tahun.

Untuk belanja barang dan belanja modal di tahun 2015 terlihat ada peningkatan, karena adanya pemanfaatan dari efisiensi anggaran, hanya belanja pegawai yang menurun yang disebabkan adanya tunjangan kinerja yang dibayarkan secara terpusat. Data dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.3 Perbandingan anggaran 2015 dengan anggaran 2014

NO.	JENIS BELANJA	TAHUN 2015			TAHUN 2014		
		PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
1	Belanja Pegawai	6.928.783.000	6.294.919.881	90,85	9.674.351.000	9.201.552.415	95,11
2	Belanja Barang	9.258.639.000	8.800.031.433	95,05	9.194.100.000	8.627.774.222	93,84
3	Belanja Modal	7.891.845.000	7.178.915.774	90,97	518.170.700	518.170.700	93,89
	TOTAL	24.079.267.000	22.273.867.088	92,50	19.420.361.000	18.347.497.337	94,48

Pengelolaan anggaran oleh BBPOM di Denpasar telah diupayakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan senantiasa berpedoman kepada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

Upaya yang dilakukan selanjutnya adalah meningkatkan penerapan prinsip - prinsip akuntabilitas, selalu mengikuti aturan keuangan termutahir dan menerapkan Sistem pengendalian Pnternal Pemerintah (SPIP) dengan menjadikan pengelolaan keuangan sebagai salah satu pengendalian utama.

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan media pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP juga dapat dipakai sebagai umpan balik pengambilan keputusan pihak-pihak terkait dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan dan/atau peningkatan kinerja di masa mendatang.

BBPOM di Denpasar telah menetapkan 3 sasaran strategis yang ingin dicapai dengan mengacu kepada sasaran yang ditargetkan dalam Renstra tahun 2015-2019. Untuk mewujudkan sasaran tersebut, telah dilaksanakan 155 sub kegiatan strategis yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja BBPOM di Denpasar tahun 2015.

Berdasarkan Pengukuran dan Evaluasi Kinerja yang dilakukan, secara garis besar diperoleh capaian kinerja sebagai berikut:

- ❖ BBPOM di Denpasar telah mewujudkan 3 sasaran strategis dan 7 sasaran kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2015-2019 dan Rencana Kinerja Tahunan 2015.
- ❖ Capaian Sasaran Strategi dengan kriteria 5 memuaskan, 1 baik, 1 tidak dapat disimpulkan dan 1 cukup.
- ❖ Capaian Sasaran Kegiatan dengan kriteria 8 memuaskan dan 1 tidak dapat disimpulkan.
- ❖ Selama Tahun 2015, dari 155 sub kegiatan yang ditetapkan, telah dilaksanakan dengan hasil 148 (95,48%) efisien dan 7 (4,52%) tidak efisien.

Anggaran BBPOM di Denpasar pada tahun 2015 sebesar Rp 24.079.267.000 yang meliputi Belanja Pegawai Rp 6.928.783.000, Belanja Barang Rp 9.258.639.000 serta Belanja Modal Rp 7.891.845.000. Sedangkan realisasinya adalah Rp 22.273.867.088 (92,50%) yang terdiri dari Belanja Pegawai Rp 6.294.919.881 (90,85%), Belanja Barang Rp 8.800.031.433 (95,05%) serta Belanja Modal Rp 7.178.915.774 (90,97%).

Persentase realisasi anggaran tahun 2015 lebih kecil dibandingkan persentase realisasi anggaran tahun 2014. Hal ini terjadi karena sisa anggaran untuk optimalisasi tidak bisa dimanfaatkan dan terbatasnya waktu di akhir tahun Pencapaian kinerja tersebut diatas menunjukkan bahwa hampir seluruh kegiatan Balai Besar POM di Denpasar pada Tahun 2015 telah dapat direalisasikan sesuai dengan target yang ditetapkan. Namun demikian, masih terdapat beberapa kegiatan yang dikategorikan tidak efisien. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain banyaknya perkara yang ditangani tanpa dilakukan gelar perkara hanya dilakukan gelar kasus karena perkara sudah dapat dituntaskan, adanya kegiatan antar pusat dan balai yang tidak dilaksanakan, adanya beberapa sarana yang sudah tidak beroperasi saat dilakukan pengawasan dan adanya kegiatan yang dilakukan bersamaan dengan bidang-bidang lain.

Terkait dengan capaian kinerja tersebut, Balai Besar POM di Denpasar secara terus menerus berupaya melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Upaya perbaikan yang dilakukan antara lain:

- ❖ Meningkatkan kompetensi dan kapabilitas Sumber Daya Manusia Balai Besar POM di Denpasar melalui pendidikan dan pelatihan.
- ❖ Meningkatkan intensitas dan kualitas monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan serta pengelolaan anggaran dan kegiatan.
- ❖ Menambah jumlah SDM karena beban kerja yang terus meningkat serta kemajuan ilmu dan teknologi yang begitu pesat.
- ❖ Memperkuat jejaring kerja dengan Lintas Sektor terkait.
- ❖ Meningkatkan koordinasi dengan Badan POM.
- ❖ Membuat sinkronisasi jadwal kegiatan antar bidang/sub bagian.
- ❖ Melakukan evaluasi secara rutin terhadap target dalam rangka meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Demikian paparan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BBPOM di Denpasar tahun 2015 semoga laporan ini dapat bermanfaat untuk pembaca terutama Badan POM RI untuk mengarah ke tahun selanjutnya dan sebagai referensi. Tentunya masih banyak kekurangan dan kelemahan dari laporan yang dibuat. Kekurangannya kami mohon maaf.

“OM SHANTI SHANTI SHANTI OM”



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI DENPASAR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. Endang Widowati, Apt.
Jabatan : Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Roy A. Sparringa, M.App.,Sc.
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI
Selaku atasan pihak pertama,

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Denpasar, 1 April 2015
Pihak Pertama



Pihak Kedua

Dr. Roy A. Sparringa, M.App.,Sc.
NIP. 19620501 198703 1 002

Dra. Endang Widowati, Apt
NIP. 19570905 198903 2 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI DENPASAR**

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)
1. Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	92,00%
	2. Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	80,00%
	3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	89,00%
	4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	79,00%
	5. Persentase Makanan yang memenuhi syarat meningkat	88,10%
2. Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat.	1. Tingkat Kepuasan Masyarakat	80%
	2. Jumlah Kabupaten / Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	3
3. Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	Nilai SAKIP BBPOM di Denpasar Oleh Badan POM RI	A
Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan		
1. Meningkatkan kualitas sampling dan pengujian terhadap produk Obat dan Makanan yang beredar	1. Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	3500
	2. Pemenuhan target sampling produk obat di sektor publik (IFK)	100%
2. Meningkatkan kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	25
3. Meningkatkan kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	24
4. Meningkatkan hasil tindak lanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	9
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat		
1. Meningkatkan kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	1. Jumlah layanan publik BB/BPOM	1145
	2. Jumlah komunitas yang diberdayakan	17
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai BPOM		
1. Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Terkait Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	70%
2. Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10

Kegiatan
Pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Denpasar

Anggaran
Rp. 24.329.504.000



Denpasar, 1 April 2015
Kepala Balai Besar POM di Denpasar

Dra. Endang Widowati, Apt.
NIP. 19570905 198903 2 001

FORMULIR RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

NO	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET 2015	TARGET				REALISASI				KETERANGAN
		URAIAN	SATUAN		B3	B6	B9	B12	B3	B6	B9	B12	
1	Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat *	Persen	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	100,00	98,96	99,33	99,00	
		2. Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat *	Persen	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	74,24	77,12	70,98	76,00	
		3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat *	Persen	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	92,68	94,17	95,09	95,33	
		4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat *	Persen	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
		5. Persentase makanan yang memenuhi syarat *	Persen	88,10	88,10	88,10	88,10	88,10	92,38	89,15	89,60	91,78	
2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	1. Tingkat Kepuasan Masyarakat *	Persen	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	86,73	82,97	81,77	83,87	
		2. Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	Kabupaten/Kota	3	3	3	3	3,00	3	3	3	3	
3	Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM	Nilai SAKIP dari BPOM		A				A				B	
Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan													
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	1. Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	Sampel	3500	627	1.765	2.661	3.500	463	1561	2438	3500	
		2. Pemenuhan target sampling produk obat di sektor publik (IFK)	Persen	100	25	50	75	100	0	45	100	100	
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	Persen	25	25	25	25	25	7	16	21	30	
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	Persen	24	24	24	24	24	6	12	17	27	
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	Perkara	9	1	3	6	9	3	4	8	9	

NO	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET 2015	TARGET				REALISASI				KETERANGAN	
		URAIAN	SATUAN		B3	B6	B9	B12	B3	B6	B9	B12		
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat														
1	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	1	Jumlah layanan Publik BBPOM di Denpasar	Layanan	1145	300	600	850	1145	415	832	1174	1546	
		2	Jumlah Komunitas yang diberdayakan	Desa	17	14	17	17	17	14	17	17	17	
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai BPOM														
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Terkait Pengawasan Obat dan Makanan		Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana sesuai standar	Persen	70	70	70	70	70	66	66	66	76,04	
2	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporka tepat waktu	Dokumen	10	6	7	9	10	3	5	8	10	

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI DENPASAR
TAHUN 2015

Unit Organisasi Eselon II : Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar
 Tahun Anggaran : 2015

Sasaran Strategis	Indikator Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	92,00%	99,00%	108
	2. Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	80,00%	76,00%	95
	3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	89,00%	95,33%	107,11
	4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	79,00%	100%	127
	5. Persentase Makanan yang memenuhi syarat meningkat	88,10%	91,78%	104
2. Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat.	1. Tingkat Kepuasan Masyarakat	80%	83,87%	105
	2. Jumlah Kabupaten / Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	3	3	100
3. Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	Nilai SAKIP BBPOM di Denpasar Oleh Badan POM RI	A (80%-90%)	B(67,99%)	84,99
Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan				
1 Meningkatkan kualitas sampling dan pengujian terhadap produk Obat dan Makanan yang beredar	1. Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	3500	3500	100
	2. Pemenuhan target sampling produk obat di sektor publik (IFK)	100%	100%	100
2 Meningkatkan kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	25	30	120
3 Meningkatkan kualitas sarana distribusi yang memenuhi standard	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	24	27	113
4 Meningkatkan hasil tindak lanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	9	9	100
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan,				
1 Meningkatkan kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	1 Jumlah layanan publik BB/BPOM	1145	1546	135
	2 Jumlah komunitas yang diberdayakan	17	17	100
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai BPOM				
1 Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Terkait Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	70%	76,05%	107
2 Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10	10	100

Jumlah Anggaran

Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Denpasar : Rp. 24.079.267.000

Realisasi Anggaran Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Denpasar Rp. 22.273.867.088

**PENGUKURAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
BALAI BESAR POM DI DENPASAR
TAHUN 2015**

SASARAN STRATEGIS	SASARAN KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN/	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%	
MENGOATNYA SISTEM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	MENINGKATNYA KUALITAS SAMPLING DAN PENGUJIAN TERHADAP PRODUK OBAT DAN MAKANAN YANG BEREDAR	1.01	KAJIAN RISIKO ZAT KONTAK PANGAN BERISIKO TINGGI	Input : Dana Output : Jumlah Petugas yang mengikuti Kegiatan Kajian Risiko zat Kontak Pangan	5.052.000 1	4.550.300 1	90,07 100,00
		1.02	PENINGKATAN SISTEM MUTU LABORATORIUM	Input : Dana Output : Konsistensi pelaksanaan Sistem Mutu Laboratorium	11.752.000 1	11.751.250 1	99,99 100,00
		1.03	KALIBRASI ALAT LABORATORIUM (1 DOKUMEN)	Input : Dana Output : Jumlah Kegiatan Kalibrasi yang dilakukan	37.350.000 1	37.338.800 1	99,97 100,00
		1.04	VERIFIKASI VOLUMETRIK INTERNAL DAN CEK ANTARA TIMBANGAN	Input : Dana Output : Jumlah Kegiatan Verifikasi yang dilakukan	3.200.000 1	3.200.000 1	100,00 100,00
		1.05	VERIFIKASI METODE ANALISA	Input : Dana Output : Jumlah Kegiatan verifikasi metode analisa yang dilakukan	109.600.000 62	109.600.000 62	100,00 100,00
		1.06	AUDIT INTERNAL SISTEM MUTU OLEH KJM DI DENPASAR (1 DOKUMEN)	Input : Dana Output : Terlaksananya audit internal Sistem Mutu	5.280.000 1	5.280.000 1	100,00 100,00
		1.07	ASESMEN PENERAPAN PROGRAM LAB RUKUKAN/UNGGULAN DAN PENERAPAN SISTEM MUTU	Input : Dana Output : Terlaksananya Assesmen Penerapan Program Lab Rujukan/Unggulan dan	9.050.000 1	8.840.000 1	97,68 100,00
		1.08	PENGEMBANGAN BAKU PEMBANDING SEKUNDER DAN BAKU KERJA	Input : Dana Output : Jumlah kegiatan pengembangan baku pembanding sekunder dan baku kerja	6.700.000 1	6.695.000 1	99,93 100,00
		1.09	PEMBAHASAN HASIL UJI KOLABORASI BAKU PEMBANDING DI JAKARTA	Input : Dana Output : Jumlah peserta yang mengikuti kolaborasi baku pembanding	5.084.000 1	5.081.750 1	99,96 100,00
		1.10	KAJI ULANG MANAJEMEN DAN TEKNIS LABORATORIUM	Input : Dana Output : kegiatan kaji ulang manajemen dan teknis yang dilakukan	3.700.000 1	3.700.000 1	100,00 100,00
		1.11	KAJI ULANG DOKUMEN SISTEM MUTU	Input : Dana Output : Jumlah peserta kaji ulang dokumen sistem mutu	5.170.000 22	5.170.000 22	100,00 100,00
		1.12	KONSULTASI SISTEM MUTU	Input : Dana Output : Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan	18.246.000 3	14.893.800 3	81,63 100,00
		1.13	EVALUASI TEKNIS PENGUJIAN MELALUI UJI PROFISIENSI/UJI BANDING DAN UJI PETIK DI BBPOM/BPOM	Input : Dana Output : Jumlah kegiatan evaluasi teknis pengujian melalui uji profisiensi/uji banding dan uji petik di BBPOM/BPOM	64.440.000 10	62.986.100 10	97,74 100,00
		1.14	PENGEMBANGAN METODE ANALISA	Input : Dana Output : Jumlah kegiatan pengembangan metode analisa	37.600.000 6	37.580.949 6	99,95 100,00
		1.15	FORUM DISKUSI PENINGKATAN TEKNIS PENGUJIAN BADAN POM DI BANDUNG	Input : Dana Output : diskusi peningkatan teknis pengujian	23.608.000 4	21.377.000 4	90,55 100,00

SASARAN STRATEGIS	SASARAN KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN/	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
		1.16 FORUM DISKUSI LAB RUJUKAN DAN UNGGULAN BALAI BESAR/BALAI POM	Input : Dana Output : Jumlah peserta yang mengikuti forum diskusi lab rujukan dan unggulan Balai Besar/Balai POM	12.204.000 4	11.531.600 4	94,49 100,00
		1.17 PEMBAHASAN DRAFT PEDOMAN SAMPLING TH. 2016	Input : Dana Output : Jumlah peserta yang mengikuti pembahasan draft pedoman sampling th 2016	26.440.000 4	17.986.800 4	68,03 100,00
		1.18 PENGAMANAN MAKANAN TAMU NEGARA	Input : Dana Output : Jumlah pemantauan pengamanan makanan tamu negara yang dilakukan	102.000.000 196	98.080.000 192	96,16 97,96
		1.19 PELATIHAN ANALISIS PANGAN DI JAKARTA	Input : Dana Output : Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan analisis pangan di Jakarta	8.268.000 1	8.262.800 1	99,94 100,00
		1.20 PELATIHAN ANALISIS KOSMETIK DI JAKARTA	Input : Dana Output : Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan analisis kosmetik di Jakarta	7.229.000 1	7.198.900 1	99,58 100,00
		1.21 PELATIHAN ANALISIS MIKROBIOLOGI DI JAKARTA	Input : Dana Output : Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan analisis mikrobiologi di Jakarta	8.837.000 1	8.806.300 1	99,65 100,00
		1.22 PELATIHAN AUDITOR SISTEM MUTU	Input : Dana Output : Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan auditor sistem mutu	10.274.000 1	8.968.500 1	87,29 100,00
		1.23 PELATIHAN INTERNAL JAMINAN MUTU HASIL PENGUJIAN	Input : Dana Output : Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan internal jaminan mutu hasil pengujian	11.230.000 43	11.175.000 43	99,51 100,00
		1.24 PELATIHAN ANALISIS 3MCPD DI JAKARTA	Input : Dana Output : Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan analisis 3MCPD di Jakarta	8.410.000 1	6.730.000 1	80,02 100,00
		1.25 PENYUSUNAN PERENCANAAN SAMPLING	Input : Dana Output : Jumlah peserta yang mengikuti penyusunan perencanaan sampling	4.800.000 20	4.800.000 20	100,00 100,00
		1.26 PENGADAAN SAMPEL	Input : Dana Output : Jumlah Sampel yang diadakan	736.300.000 3.500	679.859.128 3.500	92,33 100,00
		1.27 PENGUJIAN LABORATORIUM SAMPEL OBAT, OT, KOSMETIK, PK, PANGAN, KEMASAN PANGAN & PKRT	Input : Dana Output : Jumlah Sampel yang diuji	1.038.970.000 3.500	1.035.842.876 3.500	99,70 100,00
		1.28 EVALUASI PENGUJIAN	Input : Dana Output : Jumlah peserta yang mengikuti evaluasi pengujian	4.800.000 20	4.800.000 20	100,00 100,00
		1.29 PENETAPAN PRIORITAS SAMPLING DI JAKARTA	Input : Dana Output : Jumlah Pegawai yang mengikuti Pertemuan	4.997.000 1	4.637.000 1	92,80 100,00

SASARAN STRATEGIS	SASARAN KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN/	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
		1.30 OPERASIONAL MOBIL LABORATORIUM KELILING (9 LAYANAN)	Input : Dana Output : Jumlah sarana yang di kunjungi BBPOM di Denpasar	106.825.000 40	99.648.450 45	93,28 112,50
		1.31 AUDIT RESERTIFIKASI QMS ISO 9001: 2008	Input : Dana Output : Terlaksananya Audit Resertifikasi QMS ISO 9001:2008	6.400.000 1	6.400.000 1	100,00 100,00
		1.32 AUDIT INTERNAL QMS ISO 9001 : 2008	Input : Dana Output : Terlaksananya Audit Internal dan Eksternal Sistem Manajemen Mutu Badan POM	8.500.000 1	8.500.000 1	100,00 100,00
		1.33 CORRECTIVE AND PREVENTIVE ACTION (CAPA)	Input : Dana Output : Terlaksananya Corrective and Preventive Action (CAPA)	4.950.000 1	4.950.000 1	100,00 100,00
		1.34 AWARENESS QMS ISO 9001 : 2008	Input : Dana Output : Terlaksananya Awareness QMS ISO 9001:2008	6.600.000 1	6.600.000 1	100,00 100,00
		1.35 KAJI ULANG DOKUMEN QMS ISO 9001: 2008	Input : Dana Output : Jumlah Peserta yang mengikuti Kaji Ulang Manajemen	1.650.000 30	1.650.000 30	100,00 100,00
		1.36 TINJAUAN MANAJEMEN	Input : Dana Output : Terlaksananya tinjauan manajemen	15.200.000 1	15.200.000 1	100,00 100,00
	MENINGKATNYA KUALITAS SARANA PRODUKSI YANG MEMENUHI STANDAR	1.37 AUDIT DALAM RANGKA PRA SERTIFIKASI/SERTIFIKASI/REGISTRASI DAN HALAL	Input : Dana Output : Jumlah Sarana yang di audit	43.860.000 45	37.662.000 45	85,87 100,00
		1.38 AUDIT PRASERTIFIKASI DAN SERTIFIKASI GMP	Input : Dana Output : Jumlah Sarana yang di audit	17.260.000 19	15.796.000 19	91,52 100,00
		1.39 AUDIT SURVEILAN PENERIMA PIAGAM BINTANG KEAMANAN PANGAN (PBKP)	Input : Dana Output : Jumlah Sarana yang di audit	22.280.000 24	21.716.200 24	97,47 100,00
		1.40 PELATIHAN SURVEILAN KEAMANAN PANGAN DI JAKARTA	Input : Dana Output : Jumlah Petugas yang mengikuti Pelatihan Surveiln Keamanan Pangan	6.202.000 1	5.370.200 1	86,59 100,00
		1.41 PELATIHAN ASPEK BANGUNAN, FASILITAS DAN PERALATAN INDUSTRI KOSMETIK DAN OBAT TRADISIONAL BAGI PETUGAS PUSAT DAN BALAI	Input : Dana Output : Jumlah Petugas Balai yang mengikuti Pelatihan aspek bangunan	1.440.000 1	770.000 1	53,47 100,00
		1.42 PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN OLEH PETUGAS BALAI (DALAM KOTA) DI PROVINSI BALI (62 SARANA)	Input : Dana Output : Jumlah sarana yang diperiksa	18.450.000 62	18.407.800 71	99,77 114,52
		1.43 PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN OLEH PETUGAS BALAI (DI LUAR KOTA) DI PROVINSI BALI (140 SARANA)	Input : Dana Output : Jumlah sarana yang diperiksa	102.116.000 140	100.674.000 131	98,59 93,57
		1.44 DESIMINASI HASIL PELATIHAN	Input : Dana Output : jumlah pegawai yang mengikuti deseminasi	8.400.000 120	8.400.000 120	100,00 100,00

SASARAN STRATEGIS	SASARAN KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN/	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
		1.45 PELATIHAN CPOTB DASAR DI JAKARTA	Input : Dana	6.131.000	4.725.600	77,08
			Output : Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan	1	1	100,00
		1.46 PELATIHAN CPOTB LANJUTAN DI JAKARTA	Input : Dana	1.140.000	730.000	64,04
			Output : Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan	1	1	100,00
		1.47 PELATIHAN CPOTB TOPIK KHUSUS DI JAKARTA	Input : Dana	1.140.000	980.000	85,96
			Output : Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan	1	1	100,00
		1.48 PELATIHAN INSPEKTUR KOSMETIK YUNIOR DI JAKARTA	Input : Dana	6.202.000	5.539.000	89,31
			Output : Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan	1	1	100,00
		1.49 PELATIHAN INSPEKTUR KOSMETIK SENIOR DI JAKARTA	Input : Dana	6.202.000	5.545.300	89,41
			Output : Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan	1	1	100,00
		1.50 PELATIHAN NASIONAL FOOD INSPECTOR TINGKAT DASAR DI JAKARTA	Input : Dana	6.200.000	5.661.025	91,31
			Output : Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan	1	1	100,00
		1.51 FORUM KOMUNIKASI TAHUNAN INSPEKTORAT CPKB DI JAKARTA	Input : Dana	1.140.000	1.140.000	100,00
			Output : Jumlah Pegawai yang mengikuti pertemuan	1	1	100,00
		1.52 PENGAWASAN INDUSTRI GARAM	Input : Dana	17.160.000	16.960.000	98,83
			Output : Jumlah sarana yang diawasi	16	14	87,50
	MENINGKATNYA KUALITAS SARANA DISTRIBUSI YANG MEMENUHI STANDAR	1.53 JOINT INSPECTION	Input : Dana	7.793.000	6.213.400	79,73
			Output : Jumlah Pegawai yang mengikuti Inspeksi	1	1	100,00
		1.54 PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI PRODUK OBAT DAN MAKANAN OLEH PETUGAS BALAI (DI DALAM KOTA) DI PROVINSI BALI (228 SARANA)	Input : Dana	48.350.000	48.251.000	99,80
			Output : Jumlah sarana yang diperiksa	228	233	102,19
		1.55 PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI PRODUK OBAT DAN MAKANAN OLEH PETUGAS BALAI (DI LUAR KOTA) DI PROVINSI BALI (610 SARANA)	Input : Dana	350.010.000	345.380.500	98,68
			Output : Jumlah sarana yang diperiksa	610	634	103,93
		1.56 PENGAWASAN PENANDAAN OBAT DAN MAKANAN	Input : Dana	36.280.000	28.502.600	78,56
			Output : Jumlah jumlah sarana yang diperiksa penandaan obatnya	56	56	100,00
		1.57 PENGAWASAN PERIKLANAN OBAT DAN MAKANAN	Input : Dana	32.111.000	30.710.000	95,64
			Output : Jumlah iklan yang diawasi	580	768	132,41
		1.58 PENGAWASAN DALAM RANGKA INTENSIFIKASI/PENERTIBAN PASAR	Input : Dana	46.160.000	45.000.000	97,49
			Output : Jumlah sasaran	104	102	98,08
		1.59 EVALUASI PENERTIBAN PASAR DALAM NEGERI DARI KOSMETIKA YANG TMS DI JAKARTA	Input : Dana	2.280.000	1.130.000	49,56
			Output : Jumlah Pegawai yang mengikuti Pertemuan	1	1	100,00
		1.60 PEMANTAPAN JEJARING PENGAWASAN PANGAN TERPADU (WORKSHOP NASIONAL) DI JAKARTA	Input : Dana	12.404.000	8.035.800	64,78
			Output : Jumlah Pegawai yang mengikuti Pertemuan	2	2	100,00
		1.61 SOSIALISASI PERATURAN DI BIDANG DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN	Input : Dana	18.440.000	17.510.000	94,96
			Output : Jumlah Peserta yang mengikuti Pertemuan	50	50	100,00
		1.62 SOSIALISASI JUMLAH CDOB DAN KAJIAN TINDAK LANJUT PEDOMAN CDOB DI JAKARTA	Input : Dana	9.762.000	6.852.000	70,19
			Output : Jumlah Pegawai yang mengikuti Pertemuan	1	1	100,00

SASARAN STRATEGIS	SASARAN KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN/	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
		1.63 PELATIHAN PENGAWASAN PERIKLAMAN DAN PELABELAN PANGAN DI JAKARTA	Input : Dana Output : Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan	6.202.000 1	5.899.535 1	95,12 100,00
		1.64 PELATIHAN PENGAWASAN PEREDARAN OT DAN SM DI JAKARTA	Input : Dana Output : Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan	1.140.000 1	980.000 1	85,96 100,00
		1.65 PELATIHAN INTERNAL CDOB	Input : Dana Output : Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan	27.172.000 25	19.233.000 25	70,78 100,00
		1.66 PERJALANAN SAMPLING	Input : Dana Output : Jumlah sampel fortifikasi yang disampling	21.880.000 100	21.340.000 116	97,53 116,00
		1.67 RAPAT KONSULTASI KEDEPUTIAN II	Input : Dana Output : Jumlah Pegawai yang mengikuti Pertemuan	10.346.000 2	9.008.600 2	87,07 100,00
		1.68 KONSULTASI PENGAWASAN KE JAKARTA	Input : Dana Output : Jumlah Pegawai yang mengikuti Pertemuan	25.340.000 4	10.065.560 4	39,72 100,00
		1.69 FOCUS GROUP DISCUSSION	Input : Dana Output : Jumlah Peserta yang mengikuti diskusi	16.328.000 40	15.495.000 36	94,90 90,00
		1.70 AUDIT SKI / SKE	Input : Dana Output : Jumlah Sarana yang di audit	14.800.000 14	14.397.400 14	97,28 100,00
		1.71 PENINGKATAN KOMPETENSI EVALUATOR SKI/SKE PUSAT DAN DAERAH	Input : Dana Output : Jumlah Petugas Balai yang mengikuti Pelatihan Evaluator SKI/SKE	2.280.000 2	1.885.000 2	82,68 100,00
	MENINGKATNYA HASIL TINDAK LANJUT PENYIDIKAN TERHADAP PELANGGARAN OBAT DAN MAKANAN	1.72 PENGUMPULAN BAHAN KETERANGAN, VERIFIKASI INFORMASI DAN RENCANA INVESTIGASI AWAL	Input : Dana Output : Jumlah laporan	16.740.000 18	11.917.500 18	71,19 100,00
		1.73 PELAKSANAAN INVESTIGASI AWAL DI DALAM KOTA	Input : Dana Output : Jumlah laporan investigasi	103.600.000 10	91.127.000 10	87,96 100,00
		1.74 PELAKSANAAN INVESTIGASI AWAL DI LUAR KOTA	Input : Dana Output : Jumlah laporan investigasi	121.280.000 8	108.388.000 8	89,37 100,00
		1.75 EVALUASI INVESTIGASI AWAL DAN GELAR KASUS	Input : Dana Output : Jumlah laporan	16.740.000 18	12.204.250 18	72,90 100,00
		1.76 PELAPORAN HASIL INVESTIGASI AWAL	Input : Dana Output : Jumlah laporan	16.740.000 18	8.114.750 18	48,48 100,00
		1.77 RAPAT PEMBAHASAN PENYIDIKAN, SKENARIO	Input : Dana Output : Jumlah laporan	8.370.000 9	3.870.000 9	46,24 100,00
		1.78 PENINDAKAN	Input : Dana Output : Jumlah paket perjalanan yang dilakukan	58.843.000 9	54.013.850 9	91,79 100,00
		1.79 PENYELESAIAN BERKAS PERKARA	Input : Dana Output : Jumlah perkara yg diselesaikan	61.460.000 9	32.035.000 9	52,12 100,00
		1.80 GELAR PERKARA	Input : Dana Output : Jumlah laporan	13.770.000 9	8.820.000 4	64,05 44,44

SASARAN STRATEGIS	SASARAN KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN/	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%	
		1.81	PENYEGARAN KOMPETENSI PPNS	Input : Dana	4.350.000	4.349.500	99,99
				Output : Jumlah peserta pertemuan	20	20	100,00
		1.82	OPERASI GABUNGAN DAERAH	Input : Dana	39.600.000	33.980.000	85,81
				Output : Jumlah paket perjalanan operasi yang dilakukan	8	8	100,00
		1.83	OPERASI GABUNGAN NASIONAL	Input : Dana	9.900.000	8.600.000	86,87
				Output : Jumlah paket perjalanan operasi yang dilakukan	2	2	100,00
		1.84	OPERASI SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN OBAT DAN MAKANAN ILEGAL	Input : Dana	35.750.000	32.600.000	91,19
				Output : Jumlah paket perjalanan operasi yang dilakukan	6	6	100,00
		1.85	PERJALANAN DALAM RANGKA PENEGAK HUKUM	Input : Dana	7.750.000	7.590.000	97,94
				Output : Jumlah perjalanan yang dilakukan	25	25	100,00
		1.86	PUBLIKASI PENINDAKAN OBAT DAN MAKANAN	Input : Dana	1.650.000	1.650.000	100,00
				Output : Publikasi yang dilakukan	1	1	100,00
		1.87	PERTEMUAN PERKUATAN MEKANISME OPERASI PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BOGOR	Input : Dana	6.202.000	6.006.300	96,84
				Output : Jumlah pegawai yg mengikuti pertemuan	1	1	100,00
		1.88	PERTEMUAN PENINGKATAN KINERJA, PROFESIONALISME DAN KOORDINASI PPNS BADAN POM DI BANTEN	Input : Dana	12.404.000	9.677.600	78,02
				Output : Jumlah peserta yg mengikuti pertemuan	2	2	100,00
		1.89	PERTEMUAN KOORDINASI LINTAS SEKTOR DALAM RANGKA PEMANTAPAN KEGIATAN PENYIDIKAN	Input : Dana	7.282.000	5.882.000	80,77
				Output : Jumlah pegawai yg mengikuti pertemuan	1	1	100,00
		1.90	RAPAT PEMBAHASAN CEGAH TANGKAL	Input : Dana	11.615.000	11.561.200	99,54
				Output : Jumlah peserta yg mengikuti pertemuan	33	33	100,00
1.91	PEMUSNAHAN OMKABA TMK	Input : Dana	14.724.000	7.550.000	51,28		
		Output : Jumlah kegiatan pemusnahan	1	1	100,00		
1.92	PENINGKATAN KEMAMPUAN INVESTIGASI AWAL DAN DASAR PPNS BADAN POM DI BANTEN	Input : Dana	6.556.000	5.708.389	87,07		
		Output : Jumlah pegawai yg mengikuti pertemuan	1	1	100,00		
1.93	PENINGKATAN KEMAMPUAN PENYIDIKAN BADAN POM DI BOGOR	Input : Dana	5.972.000	4.768.600	79,85		
		Output : Jumlah pegawai yg mengikuti pertemuan	1	1	100,00		
1.94	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INTELJEN BAGI PETUGAS BADAN POM RI	Input : Dana	12.404.000	9.834.637	79,29		
		Output : Jumlah pegawai yg mengikuti pertemuan	2	2	100,00		
MENINGKATNYA KEMANDIRIAN PELAKU USAHA, KEMITRAAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT	MENINGKATNYA KERJASAMA, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI	2.01	ADVOKASI BBPOM KE INSTANSI PEMERINTAH LAINNYA	Input : Dana	14.800.000	14.397.400	97,28
				Output : Jumlah Instansi yang di advokasi	9	9	100,00
				2.02	KOORDINASI TEKNIS DENGAN INSTANSI PEMERINTAH DAN STAKE HOLDER	Input : Dana	7.870.000
Output : Instansi Pemerintah yang berkoordinasi dengan BBPOM di Denpasar	9	14	155,56				
2.03	OPERASIONAL SENTRA INFORMASI KERACUNAN (SIKER) DAN SURVEILAN KLB KERACUNAN PANGAN	Input : Dana	11.300.000	11.237.500	99,45		
		Output : Jumlah RS yang melaporkan kasus keracunan di 9 kab/kota	9	10	111,11		

SASARAN STRATEGIS	SASARAN KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN/	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%			
		2.04	PAMERAN PEMBANGUNAN 17 AGUSTUS BBPOM DI DENPASAR	Input : Dana Output : Jumlah Pameran Pembangunan	55.375.000 1	55.174.950 1	99,64 100,00		
		2.05	PAMERAN/PROMOSI KEGIATAN BBPOM DI DENPASAR DI KABUPATEN/KOTA	Input : Dana Output : Jumlah Pameran Promosi BBPOM di Denpasar	33.795.000 2	32.234.600 5	95,38 250,00		
		2.06	PENYEBARAN INFORMASI PRODUK OBAT DAN MAKANAN	Input : Dana Output : Jumlah instansi yang bekerja sama melakukan Penyebaran Informasi	71.150.000 13	70.080.000 13	98,50 100,00		
		2.07	KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI	Input : Dana Output : Jumlah KIE (Radio dan TV)	120.488.000 9	120.419.600 14	99,94 155,56		
		2.08	PENINGKATAN KEMAMPUAN UKOT DAN UMOT	Input : Dana Output : Jumlah sarana yang ditingkatkan kemampuannya	2.400.000 4	- -	- -		
		2.09	KIE DALAM RANGKA SOSIALISASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Input : Dana Output : Jumlah peserta yang mengikuti KIE	165.240.000 500	155.039.700 500	93,83 100,00		
		2.10	RE-ORIENTASI KEAMANAN PANGAN-BALAI	Input : Dana Output : Jumlah peserta Re-orientasi	85.353.000 62	58.481.650 62	68,52 100,00		
		2.11	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN USAHA PANGAN DESA DI BIDANG KEAMANAN PANGAN-BALAI	Input : Dana Output : Jumlah Peserta yang mengikuti Pemberdayaan masyarakat	240.995.000 200	240.398.250 200	99,75 100,00		
		2.12	MONITORING DAN EVALUASI-BALAI	Input : Dana Output : Jumlah Desa yang di Monev	38.329.000 3	35.364.200 3	92,26 100,00		
		2.13	PENINGKATAN KOMPETENSI PETUGAS SERLIK	Input : Dana Output : Jumlah Petugas yang mengikuti Pelatihan peningkatan Kompetensi Petugas	18.606.000 3	16.187.200 3	87,00 100,00		
		2.14	FASILITATOR PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA (TOT FASILITATOR)	Input : Dana Output : Jumlah Petugas yang mengikuti Pelatihan TOT Fasilitator Pasar Aman	5.062.000 1	4.467.900 1	88,26 100,00		
		2.15	PELATIHAN KEHUMASAN BAGI PETUGAS BALAI	Input : Dana Output : Jumlah Petugas Balai yang mengikuti Pelatihan	13.000.000 30	12.480.000 30	96,00 100,00		
		2.16	PENGAWASAN DALAM RANGKA TINDAK LANJUT PENGADUAN KONSUMEN	Input : Dana Output : Jumlah pengawasan tindak lanjut yang	22.400.000 32	22.100.000 32	98,66 100,00		
		2.17	ADVOKASI DENGAN PENEGAK HUKUM	Input : Dana Output : Jumlah advokasi yg di lakukan	15.100.000 11	12.634.400 8	83,67 72,73		
		MENINGKATKAN KUALITAS KAPASITAS KELEMBAGAAN BPOM	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA YANG TERKAIT PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	3.01	PENGADAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI	Input : Dana Output : Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	100.000.000 219	97.175.000 219	97,18 100,00
				3.02	PENINGKATAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI PEGAWAI	Input : Dana Output : Jumlah Pegawai yang ditingkatkan Kesehatan Jasmani dan Rohaninya	32.000.000 121	30.645.000 121	95,77 100,00
				3.03	PENGADAAN MAKANAN MINUMAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH PNS	Input : Dana Output : Jumlah Pegawai yang ditingkatkan daya tahan tubuhnya	99.000.000 55	99.000.000 55	100,00 100,00

SASARAN STRATEGIS	SASARAN KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN/	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
		3.04 PEMUSNAHAN RETAIN SAMPEL & BB	Input :	6.450.000	6.450.000	100,00
			Dana			
		Output :	1	1	100,00	
		Dokumen Berita Acara Pemusnahan				
		3.05 PENGADAAN ALAT LABORATORIUM	Input :	5.385.705.000	4.880.934.000	90,63
			Dana			
			Output :			
		Jumlah Alat Lab yang Diadakan	19	19	100,00	
		3.06 PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL	Input :	308.020.000	303.450.000	98,52
			Dana			
			Output :			
		Jumlah Kendaraan yang Diadakan	1	1	100,00	
		3.07 PENGADAAN PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI	Input :	343.910.000	343.528.000	99,89
			Dana			
			Output :			
		Jumlah Perangkat Pengolah Data yang diadkan	55	55	100,00	
		3.08 PENGADAAN MEUBELAIR	Input :	198.955.000	190.000.000	95,50
			Dana			
			Output :			
Jumlah Meubelair yang Diadakan	170	170	100,00			
3.09 RENOVASI GEDUNG KANTOR	Input :	1.455.265.000	1.261.463.774	86,68		
	Dana					
	Output :					
Jumlah Gedung yang Direnovasi	1	1	100,00			
3.10 PEMERIKSAAN KESEHATAN RESIKO PEKERJAAN	Input :	55.000.000	55.000.000	100,00		
	Dana					
	Output :					
Jumlah peserta yang mengikuti pemeriksaan kesehatan resiko pekerjaan	55	55	100,00			
3.11 PENYELENGGARAAN LABORATORIUM	Input :	142.100.000	141.990.016	99,92		
	Dana					
	Output :					
Terselenggaranya kegiatan laboratorium	1	1	100,00			
3.12 PENGADAAN ALAT GELAS	Input :	134.613.000	134.405.370	99,85		
	Dana					
	Output :					
Jumlah paket alat gelas yang diadkan	1	1	100,00			
3.13 PENGADAAN SUKU CADANG	Input :	447.999.000	446.260.166	99,61		
	Dana					
	Output :					
Jumlah paket suku cadang yang diadkan	1	1	100,00			
3.14 PENGADAAN GAS UNTUK INSTRUMEN DAN MEDIA MIKRO ED PENDEK	Input :	31.920.000	31.914.923	99,98		
	Dana					
	Output :					
Jumlah paket gas dan media mikro yang diadkan	1	1	100,00			
PENYUSUNAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, KEUANGAN DAN EVALUASI YANG DILAPORKAN TEPAT WAKTU	3.15 DIKLAT PEJABAT PERENCANAAN DI MALANG	Input :	4.413.000	3.190.500	72,30	
		Dana				
		Output :				
Jumlah Peserta yang mengikuti Diklat	1	1	100,00			
3.16 PENINGKATAN KOMPETENSI PETUGAS TATA USAHA DI MAKASAR	Input :	22.228.000	17.753.200	79,87		
	Dana					
	Output :					
Jumlah Peserta Mengikuti Peningkatan Kompetensi	4	4	100,00			
3.17 PENINGKATAN KOMPETENSI PETUGAS TATA USAHA	Input :	6.732.000	6.732.000	100,00		
	Dana					
	Output :					
Jumlah Peserta Yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi	1	1	100,00			
3.18 WORKSHOP PFM DI JAKARTA	Input :	12.980.000	11.617.000	89,50		
	Dana					
	Output :					
Jumlah Peserta yang mengikuti Workshop	2	2	100,00			
3.19 DIKLAT PRA JABATAN	Input :	19.851.000	18.280.200	92,09		
	Dana					
	Output :					
Jumlah Peserta yang Mengikuti Diklat	2	2	100,00			

SASARAN STRATEGIS	SASARAN KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN/	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
		3.20 SOSIALISASI PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN OLEH BKN	Input : Dana	8.090.000	6.110.000	75,53
			Output : Jumlah Peserta yang Mengikuti Kegiatan	98	62	63,27
		3.21 DIKLAT AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL	Input : Dana	7.834.000	7.015.800	89,56
			Output : Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat	1	1	100,00
		3.22 PERTEMUAN NASIONAL EVALUASI PELAKSANAAN SPIP BADAN POM DI TANGERANG	Input : Dana	18.645.000	18.645.000	100,00
			Output : Jumlah Peserta Pertemuan	3	3	100,00
		3.23 RAPAT KERJA NASIONAL DI JAKARTA	Input : Dana	25.610.000	22.538.400	88,01
			Output : Jumlah Peserta Pertemuan	5	5	100,00
		3.24 PERTEMUAN EVALUASI NASIONAL DI KENDARI	Input : Dana	33.685.000	26.733.800	79,36
			Output : Jumlah Peserta Pertemuan	5	5	100,00
		3.25 SOSIALISASI MANAJEMEN PERUBAHAN OLEH ESELON I PEMBINA	Input : Dana	6.655.000	6.655.000	100,00
			Output : Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi	121	121	100,00
		3.26 IMPLEMENTASI MANAJEMEN PERUBAHAN	Input : Dana	6.655.000	5.170.000	77,69
			Output : Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi	121	94	77,69
		3.27 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN SPIP	Input : Dana	10.549.000	10.497.500	99,51
			Output : Laporan SPIP	1	1	100,00
		3.28 PENYUSUNAN PROGRAM RKAKL DAN DIPA (2 Dokumen)	Input : Dana	18.200.000	16.918.000	92,96
			Output : Dokumen RKAKL dan DIPA BBPOM di Denpasar	2	2	100,00
		3.29 PENYUSUNAN LAKIP (1 Dokumen)	Input : Dana	10.125.000	8.630.000	85,23
			Output : Dokumen LAKIP BBPOM di Denpasar	1	-	-
		3.30 PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN (1 Dokumen)	Input : Dana	10.125.000	9.795.000	96,74
			Output : Dokumen LAPTAH BBPOM di Denpasar	1	1	100,00
		3.31 PENYUSUNAN LAPORAN BMN DAN SAKPA	Input : Dana	1.100.000	1.100.000	100,00
			Output : Dokumen Laporan BMN dan SAKPA BBPOM di Denpasar	2	2	100,00
		3.32 UJIAN DINAS / PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT DI JAKARTA	Input : Dana	4.824.000	4.823.300	99,99
			Output : Jumlah Pegawai yang Mengikuti Ujian Dinas	1	1	100,00
		3.33 PENYELENGGARAAN PENILAIAN JABATAN FUNGSIONAL (2 DOKUMEN)	Input : Dana	17.450.000	15.800.000	90,54
			Output : Dokumen Hasil Penilaian Pejabat Fungsional	2	2	100,00
		3.34 PENYELENGGARAAN PENILAIAN DISIPLIN PEGAWAI	Input : Dana	1.210.000	1.155.000	95,45
			Output : Dokumen Hasil Penilaian Disiplin Pegawai	1	1	100,00
		3.35 PENYUSUNAN RENSTRA 2015-2019	Input : Dana	3.025.000	2.970.000	98,18
			Output : Dokumen Renstra	1	1	100,00
		3.36 PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	Input : Dana	2.900.000	2.900.000	100,00
			Output : Jumlah Peserta Mengikuti Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	10	10	100,00

SASARAN STRATEGIS	SASARAN KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN/	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
		3.37 PENGELOLAAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH (SAP)	Input : Dana	22.800.000	22.550.000	98,90
			Output : Laporan Pengelolaan SAP	1	1	100,00
		3.38 ADMINISTRASI KEGIATAN	Input : Dana	694.817.000	633.638.190	91,19
			Output : Laporan Administrasi Kegiatan	1	1	100,00
		3.39 PEMBAHASAN OPTIMALISASI, EVALUASI DAN PELAPORAN KINERJA TATA USAHA	Input : Dana	8.250.000	7.370.000	89,33
			Output : Jumlah Pegawai yang mengikuti Pembahasan Optimalisasi	25	25	100,00
		3.40 KOORDINASI DALAM RANGKA PENGELOLAAN BMN/KEUANGAN/KEPEGAWAIAN	Input : Dana	7.834.000	7.588.900	96,87
			Output : Jumlah Pegawai yang Mengikuti Koordinasi	1	1	100,00
		3.41 PENGELOLAAN BMN	Input : Dana	14.700.000	14.550.000	98,98
			Output : Laporan Pengelolaan BMN	1	1	100,00
		3.42 PEMUTAHIRAN DATA BMN DI JAKARTA	Input : Dana	28.521.000	28.180.200	98,81
			Output : Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan	3	3	100,00
		3.43 SOSIALISASI PENGELOLAAN BMN DI JAWA BARAT	Input : Dana	12.022.000	11.541.750	96,01
			Output : Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi	2	2	100,00
		3.44 RAPAT EVALUASI KEGIATAN SERLIK	Input : Dana	7.100.000	4.975.000	70,07
			Output : Jumlah Rapat yang diadakan	12	9	75,00

**PENGUKURAN EFISIENSI KEGIATAN
BALAI BESAR POM DI DENPASAR
TAHUN 2015**

SASARAN STRATEGIS	SASARAN KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN/	RATA-RATA % CAPAIAN TARGET		IE	SE	KATEGORI	TE	
			INPUT	OUTPUT					
MENGUATNYA SISTEM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	MENINGKATNYA KUALITAS SAMPLING DAN PENGUJIAN TERHADAP PRODUK OBAT DAN MAKANAN YANG BEREDAR	1.01	KAJIAN RISIKO ZAT KONTAK PANGAN BERISIKO TINGGI	90,07	100,00	1,11	1,00	Efisien	0,11
		1.02	PENINGKATAN SISTEM MUTU LABORATORIUM	99,99	100,00	1,00	1,00	Efisien	0,0001
		1.03	KALIBRASI ALAT LABORATORIUM (1 DOKUMEN)	99,97	100,00	1,00	1,00	Efisien	0,0003
		1.04	VERIFIKASI VOLUMETRIK INTERNAL DAN CEK ANTARA TIMBANGAN	100,00	100,00	1,00	1,00	Efisien	-
		1.05	VERIFIKASI METODE ANALISA	100,00	100,00	1,00	1,00	Efisien	-
		1.06	AUDIT INTERNAL SISTEM MUTU OLEH KJM DI DENPASAR (1 DOKUMEN)	100,00	100,00	1,00	1,00	Efisien	-
		1.07	ASESMEN PENERAPAN PROGRAM LAB RUJUKAN/UNGGULAN DAN PENERAPAN SISTEM MUTU	97,68	100,00	1,02	1,00	Efisien	0,0238
		1.08	PENGEMBANGAN BAKU PEMBANDING SEKUNDER DAN BAKU KERJA	99,93	100,00	1,00	1,00	Efisien	0,0007
		1.09	PEMBAHASAN HASIL UJI KOLABORASI BAKU PEMBANDING DI JAKARTA	99,96	100,00	1,00	1,00	Efisien	0,0004
		1.10	KAJI ULANG MANAJEMEN DAN TEKNIS LABORATORIUM	100,00	100,00	1,00	1,00	Efisien	-
		1.11	KAJI ULANG DOKUMEN SISTEM MUTU	100,00	100,00	1,00	1,00	Efisien	-
		1.12	KONSULTASI SISTEM MUTU	81,68	100,00	1,22	1,00	Efisien	0,2243
		1.13	EVALUASI TEKNIS PENGUJIAN MELALUI UJI PROFISIENSI/UJI BANDING DAN UJI PETIK DI BBPOM/BPOM	97,74	100,00	1,02	1,00	Efisien	0,0231
		1.14	PENGEMBANGAN METODE ANALISA	99,95	100,00	1,00	1,00	Efisien	0,0005
		1.15	FORUM DISKUSI PENINGKATAN TEKNIS PENGUJIAN BADAN POM DI BANDUNG	90,55	100	1,10	1,00	Efisien	0,1044
		1.16	FORUM DISKUSI LAB RUJUKAN DAN UNGGULAN BALAI BESAR/BALAI POM	99,49	100,00	1,01	1,00	Efisien	0,0051
		1.17	PEMBAHASAN DRAFT PEDOMAN SAMPLING TH. 2016	68,03	100,00	1,47	1,00	Efisien	0,4699
		1.18	PENGAMANAN MAKANAN TAMU NEGARA	96,16	97,96	1,02	1,00	Efisien	0,0187
		1.19	PELATIHAN ANALISIS PANGAN DI JAKARTA	99,94	100	1,00	1,00	Efisien	0,0006
		1.20	PELATIHAN ANALISIS KOSMETIK DI JAKARTA	99,58	100	1,00	1,00	Efisien	0,0042
		1.21	PELATIHAN ANALISIS MIKROBIOLOGI DI JAKARTA	99,65	100	1,00	1,00	Efisien	0,0035
		1.22	PELATIHAN AUDITOR SISTEM MUTU	87,29	100,00	1,15	1,00	Efisien	0,15
		1.23	PELATIHAN INTERNAL JAMINAN MUTU HASIL PENGUJIAN	99,51	100,00	1,00	1,00	Efisien	0,00

SASARAN STRATEGIS	SASARAN KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN/	RATA-RATA % CAPAIAN TARGET		IE	SE	KATEGORI	TE
			INPUT	OUTPUT				
		1.24 PELATIHAN ANALISIS 3MCPD DI JAKARTA	80,02	100,00	1,25	1,00	Efisien	0,25
		1.25 PENYUSUNAN PERENCANAAN SAMPLING	100,00	100,00	1,00	1,00	Efisien	-
		1.26 PENGADAAN SAMPEL	92,33	100,00	1,08	1,00	Efisien	0,08
		1.27 PENGUJIAN LABORATORIUM SAMPEL OBAT, OT, KOSMETIK, PK, PANGAN, KEMASAN PANGAN & PKRT	99,70	100,00	1,00	1,00	Efisien	0,00
		1.28 EVALUASI PENGUJIAN	100,00	100,00	1,00	1,00	Efisien	-
		1.29 PENETAPAN PRIORITAS SAMPLING DI JAKARTA	92,80	100,00	1,08	1,00	Efisien	0,0776
		1.30 OPERASIONAL MOBIL LABORATORIUM KELILING (9 LAYANAN)	93,28	112,50	1,21	1,00	Efisien	0,21
		1.31 AUDIT RESERTIFIKASI QMS ISO 9001: 2008	100,00	100,00	1,00	1,00	Efisien	-
		1.32 AUDIT INTERNAL QMS ISO 9001 : 2008	100,00	100,00	1,00	1,00	Efisien	-
		1.33 CORRECTIVE AND PREVENTIVE ACTION (CAPA)	100,00	100,00	1,00	1,00	Efisien	-
		1.34 AWARENESS QMS ISO 9001 : 2008	100,00	100,00	1,00	1,00	Efisien	-
		1.35 KAJI ULANG DOKUMEN QMS ISO 9001: 2008	100,00	100,00	1,00	1,00	Efisien	-
		1.36 TINJAUAN MANAJEMEN	100,00	100,00	1,00	1,00	Efisien	-
	MENINGKATNYA KUALITAS SARANA PRODUKSI YANG MEMENUHI STANDAR	1.37 AUDIT DALAM RANGKA PRA SERTIFIKASI/SERTIFIKASI/REGISTRASI DAN HALAL	85,87	100,00	1,16	1,00	Efisien	0,16
		1.38 AUDIT PRA SERTIFIKASI DAN SERTIFIKASI GMP	91,52	100,00	1,09	1,00	Efisien	0,09
		1.39 AUDIT SURVEILAN PENERIMA PIAGAM BINTANG KEAMANAN PANGAN (PBKP)	97,47	100,00	1,03	1,00	Efisien	0,03
		1.40 PELATIHAN SURVEILAN KEAMANAN PANGAN DI JAKARTA	86,59	100,00	1,15	1,00	Efisien	0,15
		1.41 PELATIHAN ASPEK BANGUNAN, FASILITAS DAN PERALATAN INDUSTRI KOSMETIK DAN OBAT TRADISIONAL BAGI PETUGAS PUSAT DAN BALAI	53,47	100,00	1,87	1,00	Efisien	0,87
		1.42 PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN OLEH PETUGAS BALAI (DALAM KOTA) DI PROVINSI BALI (62 SARANA)	99,77	114,52	1,15	1,00	Efisien	0,15
		1.43 PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN OLEH PETUGAS BALAI (DI LUAR KOTA) DI PROVINSI BALI (140 SARANA)	98,59	93,57	0,95	1,00	Tidak Efisien	(0,05)
		1.44 DESIMINASI HASIL PELATIHAN	100,00	100,00	1,00	1,00	Efisien	-
		1.45 PELATIHAN CPOTB DASAR DI JAKARTA	77,08	100,00	1,30	1,00	Efisien	0,2974

SASARAN STRATEGIS	SASARAN KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN/	RATA-RATA % CAPAIAN TARGET		IE	SE	KATEGORI	TE
			INPUT	OUTPUT				
		1.46 PELATIHAN CPOTB LANJUTAN DI JAKARTA	64,04	100,00	1,56	1,00	Efisien	0,5615
		1.47 PELATIHAN CPOTB TOPIK KHUSUS DI JAKARTA	85,96	100,00	1,16	1,00	Efisien	0,1633
		1.48 PELATIHAN INSPEKTUR KOSMETIK YUNIOR DI JAKARTA	89,31	100,00	1,12	1,00	Efisien	0,1197
		1.49 PELATIHAN INSPEKTUR KOSMETIK SENIOR DI JAKARTA	89,41	100,00	1,12	1,00	Efisien	0,1184
		1.50 PELATIHAN NASIONAL FOOD INSPECTOR TINGKAT DASAR DI JAKARTA	91,31	100,00	1,10	1,00	Efisien	0,0952
		1.51 FORUM KOMUNIKASI TAHUNAN INSPEKTORAT CPKB DI JAKARTA	100,00	100,00	1,00	1,00	Efisien	-
		1.52 PENGAWASAN INDUSTRI GARAM	98,83	87,50	0,89		Tidak Efisien	
	MENINGKATNYA KUALITAS SARANA DISTRIBUSI YANG MEMENUHI STANDAR	1.53 JOINT INSPECTION	79,73	100,00	1,25	1,00	Efisien	0,2542
		1.54 PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI PRODUK OBAT DAN MAKANAN OLEH PETUGAS BALAI (DI DALAM KOTA) DI PROVINSI BALI (228 SARANA)	99,80	102,19	1,02	1,00	Efisien	0,0239
		1.55 PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI PRODUK OBAT DAN MAKANAN OLEH PETUGAS BALAI (DI LUAR KOTA) DI PROVINSI BALI (610 SARANA)	98,68	103,93	1,05	1,00	Efisien	0,0532
		1.56 PENGAWASAN PENANDAAN OBAT DAN MAKANAN	78,56	100,00	1,27	1,00	Efisien	0,2729
		1.57 PENGAWASAN PERIKLAMAN OBAT DAN MAKANAN	95,64	128,00	1,34	1,00	Efisien	0,3384
		1.58 PENGAWASAN DALAM RANGKA INTENSIFIKASI/PENERTIBAN PASAR	97,49	100,00	1,03	1,00	Efisien	0,0257
		1.59 EVALUASI PENERTIBAN PASAR DALAM NEGERI DARI KOSMETIKA YANG TMS DI JAKARTA	49,56	100,00	2,02	1,00	Efisien	1,0178
		1.60 PEMANTAPAN JEJARING PENGAWASAN PANGAN TERPADU (WORKSHOP NASIONAL) DI JAKARTA	64,78	100,00	1,54	1,00	Efisien	0,5437
		1.61 SOSIALISASI PERATURAN DI BIDANG DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN	94,96	100,00	1,05	1,00	Efisien	0,0531
		1.62 SOSIALISASI JUKLAK CDOB DAN KAJIAN TINDAK LANJUT PEDOMAN CDOB DI JAKARTA	70,19	100,00	1,42	1,00	Efisien	0,4247
		1.63 PELATIHAN PENGAWASAN PERIKLAMAN DAN PELABELAN PANGAN DI JAKARTA	95,12	100,00	1,05	1,00	Efisien	0,0513
		1.64 PELATIHAN PENGAWASAN PEREDARAN OT DAN SM DI JAKARTA	85,96	100,00	1,16	1,00	Efisien	0,1633
		1.65 PELATIHAN INTERNAL CDOB	70,78	100,00	1,41	1,00	Efisien	0,4128
		1.66 PERJALANAN SAMPLING	97,53	116,00	1,19		Efisien	

SASARAN STRATEGIS	SASARAN KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN/	RATA-RATA % CAPAIAN TARGET		IE	SE	KATEGORI	TE
			INPUT	OUTPUT				
		1.67 RAPAT KONSULTASI KEDEPUTIAN II	87,07	100,00	1,15	1,00	Efisien	0,1485
		1.68 KONSULTASI PENGAWASAN KE JAKARTA	39,72	100,00	2,52	1,00	Efisien	1,5176
		1.69 FOCUS GROUP DISCUSSION	94,90	90,00	0,95		Tidak Efisien	
		1.70 AUDIT SKI / SKE	97,28	100,00	1,03	1,00	Efisien	0,03
		1.71 PENINGKATAN KOMPETENSI EVALUATOR SKI/SKE PUSAT DAN DAERAH	82,68	100,00	1,21	1,00	Efisien	0,21
	MENINGKATNYA HASIL TINDAK LANJUT PENYIDIKAN TERHADAP PELANGGARAN OBAT DAN MAKANAN	1.72 PENGUMPULAN BAHAN KETERANGAN, VERIFIKASI INFORMASI DAN RENCANA INVESTIGASI AWA	71,19	100,00	1,40	1,00	Efisien	0,40
		1.73 PELAKSANAAN INVESTIGASI AWAL DI DALAM KOTA	87,96	100,00	1,14	1,00	Efisien	0,14
		1.74 PELAKSANAAN INVESTIGASI AWAL DI LUAR KOTA	89,37	100,00	1,12	1,00	Efisien	0,12
		1.75 EVALUASI INVESTIGASI AWAL DAN GELAR KASUS	72,90	100,00	1,37	1,00	Efisien	0,37
		1.76 PELAPORAN HASIL INVESTIGASI AWAL	48,48	100,00	2,06	1,00	Efisien	1,06
		1.77 RAPAT PEMBAHASAN PENYIDIKAN, SKENARIO	46,24	100,00	2,16	1,00	Efisien	1,16
		1.78 PENINDAKAN	100,00	100,00	1,00	1,00	Efisien	-
		1.79 PENYELESAIAN BERKAS PERKARA	52,12	100,00	1,92	1,00	Efisien	0,92
		1.80 GELAR PERKARA	64,05	44,55	0,70	1,00	Tidak Efisien	(0,30)
		1.81 PENYEGARAN KOMPETENSI PPNS	99,99	100,00	1,00	1,00	Efisien	0,00
		1.82 OPERASI GABUNGAN DAERAH	100,00	100,00	1,00	1,00	Efisien	-
		1.83 OPERASI GABUNGAN NASIONAL	100,00	100,00	1,00	1,00	Efisien	-
		1.84 OPERASI SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN OBAT DAN MAKANAN ILEGAL	100,00	100,00	1,00	1,00	Efisien	-
	1.85 PERJALANAN DALAM RANGKA PENEGAK HUKUM	99,87	100,00	1,00	1,00	Efisien	0,00	
	1.86 PUBLIKASI PENINDAKAN OBAT DAN MAKANAN	100,00	100,00	1,00	1,00	Efisien	-	
	1.87 PERTEMUAN PERKUATAN MEKANISME OPERASI PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BOGOR	96,84	100,00	1,03	1,00	Efisien	0,03	
	1.88 PERTEMUAN PENINGKATAN KINERJA, PROFESIONALISME DAN KOORDINASI PPNS BADAN POM DI BANTEN	78,02	100,00	1,28	1,00	Efisien	0,28	
	1.89 PERTEMUAN KOORDINASI LINTAS SEKTOR DALAM RANGKA PEMANTAPAN KEGIATAN PENYIDIKAN	80,77	100,00	1,24	1,00	Efisien	0,24	

SASARAN STRATEGIS	SASARAN KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN/	RATA-RATA % CAPAIAN TARGET		IE	SE	KATEGORI	TE
			INPUT	OUTPUT				
		1.90 RAPAT PEMBAHASAN CEGAH TANGKAL	99,54	100,00	1,00	1,00	Efisien	0,00
		1.91 PEMUSNAHAN OMKABA TMK	51,28	100,00	1,95	1,00	Efisien	0,95
		1.92 PENINGKATAN KEMAMPUAN INVESTIGASI AWAL DAN DASAR PPNS BADAN POM DI BANTEN	87,07	100,00	1,15	1,00	Efisien	0,15
		1.93 PENINGKATAN KEMAMPUAN PENYIDIKAN BADAN POM DI BOGOR	79,85	100,00	1,25	1,00	Efisien	0,25
		1.94 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INTELIJEN BAGI PETUGAS BADAN POM RI	79,29	100,00	1,26	1,00	Efisien	0,26
MENINGKATKAN KEMANDIRIAN PELAKU USAHA, KEMITRAAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT	MENINGKATKAN KERJASAMA, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI	2.01 ADVOKASI BBPOM KE INSTANSI PEMERINTAH LAINNYA	97,28	100,00	1,03	1,00	Efisien	0,03
		2.02 KOORDINASI TEKNIS DENGAN INSTANSI PEMERINTAH DAN STAKE HOLDER	97,01	155,56	1,60	1,00	Efisien	0,60
		2.03 OPERASIONAL SENTRA INFORMASI KERACUNAN (SIKER) DAN SURVEILAN KLB KERACUNAN PANGAN	99,45	111,11	1,12	1,00	Efisien	0,12
		2.04 PAMERAN PEMBANGUNAN 17 AGUSTUS BBPOM DI DENPASAR	99,64	100,00	1,00	1,00	Efisien	0,00
		2.05 PAMERAN/PROMOSI KEGIATAN BBPOM DI DENPASAR DI KABUPATEN/KOTA	95,38	250,00	2,62	1,00	Efisien	1,62
		2.06 PENYEBARAN INFORMASI PRODUK OBAT DAN MAKANAN	98,50	100,00	1,02	1,00	Efisien	0,02
		2.07 KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI	99,94	155,56	1,56	1,00	Efisien	0,56
		2.08 PENINGKATAN KEMAMPUAN UKOT DAN UMOT	0,00	0,00	-	1,00	Tidak Efisien	(1,00)
		2.09 KIE DALAM RANGKA SOSIALISASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	93,83	100,00	1,07	1,00	Efisien	0,07
		2.10 RE-ORIENTASI KEAMANAN PANGAN-BALAI	68,52	100,00	1,46	1,00	Efisien	0,46
		2.11 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN USAHA PANGAN DESA DI BIDANG KEAMANAN PANGAN-BALAI	99,75	100,00	1,00	1,00	Efisien	0,00
		2.12 MONITORING DAN EVALUASI-BALAI	92,26	100,00	1,08	1,00	Efisien	0,08
		2.13 FASILITATOR PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA (TOT FASILITATOR)	88,26	100,00	1,13	1,00	Efisien	0,13
		2.14 PENINGKATAN KOMPETENSI PETUGAS SERLIK	87,00	100,00	1,15	1,00	Efisien	0,15
		2.15 PELATIHAN KEHUMASAN BAGI PETUGAS BALAI	96,00	100,00	1,04	1,00	Efisien	0,04
		2.16 PENGAWASAN DALAM RANGKA TINDAK LANJUT PENGADUAN KONSUMEN	98,66	100,00	1,01	1,00	Efisien	0,0136
		2.17 ADVOKASI DENGAN PENEGAK HUKUM	84,66	72,73	0,86	1,00	Tidak Efisien	(0,14)
MENINGKATKAN KUALITAS KAPASITAS KELEMBAGAAN BPOM	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA YANG TERKAIT PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	3.01 PENGADAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI	97,18	100,00	1,03	1,00	Efisien	0,03
		3.02 PENINGKATAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI PEGAWAI	95,77	100,00	1,04	1,00	Efisien	0,04

SASARAN STRATEGIS	SASARAN KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN/	RATA-RATA % CAPAIAN TARGET		IE	SE	KATEGORI	TE	
			INPUT	OUTPUT					
		3.03	PENGADAAN MAKANAN MINUMAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH PNS	100,00	100,00	1,00	1,00	Efisien	-
		3.04	PEMUSNAHAN RETAIN SAMPEL & BB	100,00	100,00	1,00	1,00	Efisien	-
		3.05	PENGADAAN ALAT LABORATORIUM	90,63	100,00	1,10	1,00	Efisien	0,10
		3.06	PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL	98,52	100,00	1,02	1,00	Efisien	0,02
		3.07	PENGADAAN PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI	99,89	100,00	1,00	1,00	Efisien	0,00
		3.08	PENGADAAN MEUBELAIR	95,50	100,00	1,05	1,00	Efisien	0,05
		3.09	RENOVASI GEDUNG KANTOR	86,68	100,00	1,15	1,00	Efisien	0,15
		3.10	PEMERIKSAAN KESEHATAN RESIKO PEKERJAAN	100,00	100,00	1,00	1,00	Efisien	-
		3.11	PENYELENGGARAAN LABORATORIUM	99,92	100,00	1,00	1,00	Efisien	0,0008
		3.12	PENGADAAN ALAT GELAS	99,85	100,00	1,00	1,00	Efisien	0,0015
		3.13	PENGADAAN SUKU CADANG	99,61	100	1,00	1,00	Efisien	0,0039
		3.14	PENGADAAN GAS UNTUK INSTRUMEN DAN MEDIA MIKRO ED PENDEK	99,98	100	1,00	1,00	Efisien	0,0002
	PENYUSUNAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, KEUANGAN DAN EVALUASI YANG DILAPORKAN TEPAT WAKTU	3.15	DIKLAT PEJABAT PERENCANAAN DI MALANG	72,30	100,00	1,38	1,00	Efisien	0,38
		3.16	PENINGKATAN KOMPETENSI PETUGAS TATA USAHA DI MAKASAR	79,87	100,00	1,25	1,00	Efisien	0,25
		3.17	PENINGKATAN KOMPETENSI PETUGAS TATA USAHA	100,00	100,00	1,00	1,00	Efisien	-
		3.18	WORKSHOP PFM DI JAKARTA	89,50	100,00	1,12	1,00	Efisien	0,12
		3.19	DIKLAT PRA JABATAN	92,09	100,00	1,09	1,00	Efisien	0,09
		3.20	SOSIALISASI PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN OLEH BKN	75,53	63,27	0,84	1,00	Tidak Efisien	(0,16)
		3.21	DIKLAT AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL	89,56	100,00	1,12	1,00	Efisien	0,12
		3.22	PERTEMUAN NASIONAL EVALUASI PELAKSANAAN SPIP BADAN POM DI TANGERANG	100,00	100,00	1,00	1,00	Efisien	-
		3.23	RAPAT KERJA NASIONAL DI JAKARTA	88,01	100,00	1,14	1,00	Efisien	0,14
		3.24	PERTEMUAN EVALUASI NASIONAL DI KENDARI	79,36	100,00	1,26	1,00	Efisien	0,26
		3.25	SOSIALISASI MANAJEMEN PERUBAHAN OLEH ESELON I PEMBINA	100,00	100,00	1,00	1,00	Efisien	-
		3.26	IMPLEMENTASI MANAJEMEN PERUBAHAN	77,69	78	1,00	1	Efisien	-
		3.27	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN SPIP	99,51	100	1,00	1	Efisien	0,0049
		3.28	PENYUSUNAN PROGRAM RKAKL DAN DIPA	92,96	100	1,08	1	Efisien	0,0757

SASARAN STRATEGIS	SASARAN KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN/	RATA-RATA % CAPAIAN TARGET		IE	SE	KATEGORI	TE
			INPUT	OUTPUT				
		3.29 PENYUSUNAN LAKIP	85,23	100	1,17	1	Efisien	0,1733
		3.30 PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN	96,74	100	1,03	1	Efisien	0,0337
		3.31 PENYUSUNAN LAPORAN BMN DAN SAKPA	100	100	1,00	1	Efisien	-
		3.32 UJIAN DINAS / PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT DI JAKARTA	99,99	100	1,00	1	Efisien	0,0001
		3.33 PENYELENGGARAAN PENILAIAN JABATAN FUNGSIONAL	90,54	100	1,10	1	Efisien	0,1045
		3.34 PENYELENGGARAAN PENILAIAN DISIPLIN PEGAWAI	95,45	100	1,00	1	Efisien	-
		3.35 PENYUSUNAN RENSTRA 2015-2019	98,18	100	1,02	1	Efisien	0,0185
		3.36 PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	100	100	1,00	1	Efisien	-
		3.37 PENGELOLAAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH (SAP)	98,9	100	1,01	1	Efisien	0,0111
		3.38 ADMINISTRASI KEGIATAN	91,19	100	1,10	1	Efisien	0,0966
		3.39 PEMBAHASAN OPTIMALISASI, EVALUASI DAN PELAPORAN KINERJA TATA USAHA	89,33	100,00	1,12	1,00	Efisien	0,12
		3.40 KOORDINASI DALAM RANGKA PENGELOLAAN BMN/KEUANGAN/KEPEGAWAIAN	96,87	100,00	1,03	1,00	Efisien	0,03
		3.41 PENGELOLAAN BMN	98,98	100,00	1,01	1,00	Efisien	0,01
		3.42 PEMUTAHIRAN DATA BMN DI JAKARTA	98,81	100,00	1,01	1,00	Efisien	0,01
		3.43 SOSIALISASI PENGELOLAAN BMN DI JAWA BARAT	96,01	100,00	1,04	1,00	Efisien	0,04
		3.44 RAPAT EVALUASI KEGIATAN SERLIK	70,07	75,00	1,07	1,00	Efisien	0,07

**PERSENTASE OBAT DAN MAKANAN
MEMENUHI SYARAT
BBPOM DI DENPASAR
TAHUN 2015**

NO	KOMODITI	JUMLAH SAMPEL	TMS				% TMS	% MS
			KIMIA	MIKRO	KIMIA MIKRO	TOTAL		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Obat	700	7	0	0	7	1,00	99,00
2	Obat Tradisional	525	15	109	2	126	24,00	76,00
3	Kosmetik	1050	32	16	1	49	4,67	95,33
4	Suplemen Kesehatan	175	0	0	0	0	0,00	100,00
5	Makanan (Pangan)	742	47	14		61	8,22	91,78

**TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT
BBPOM DI DENPASAR
TAHUN 2015**

NO	UNSUR	NILAI UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA2 TERTIMBANG
1	Kemudahan prosedur pelayanan	3,238	0,231
2	Kesesuaian persyaratan pelayanan	3,226	0,230
3	Kejelasan petugas yang melayani	3,452	0,247
4	Kedisiplinan petugas dalam memberikan pelayanan	3,393	0,242
5	Tanggungjawab petugas dalam memberi pelayanan	3,429	0,245
6	Kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan	3,464	0,247
7	Kecepatan pelayanan	3,464	0,247
8	Keadilan untuk mendapatkan pelayanan	3,429	0,245
9	Kesopanan dan keramahan petugas	3,631	0,259
10	Kewajaran biaya untuk mendapat pelayanan	3,202	0,229
11	Kepastian biaya pelayanan	3,083	0,220
12	Kepastian pelaksanaan terhadap jadwal waktu pelayanan	3,167	0,226
13	Kenyamanan di lingkungan unit pelayanan	3,440	0,246
14	Keamanan pelayanan	3,369	0,241
Nilai Indeks Unit Pelayanan adalah			3,355

Nilai Penimbang = $1/14 = 0,0714$

Interval Konversi TKM yaitu antara 25 - 100, maka **Nilai Dasar 25**

**Tabel Nilai Persepsi, Interval Tingkat Kepuasan Masyarakat, Interval Konversi Tingkat Kepuasan Masyarakat,
Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan**

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL TKM	NILAI INTERVAL KONVERSI TKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00 - 1,75	25 - 43,75	D	Tidak Baik
2	1,76 - 2,50	43,76 - 62,50	C	Kurang Baik
3	2,51 - 3,25	62,51 - 81,25	B	Baik
4	3,26 - 4,00	81,26 - 100,00	A	Sangat Baik

Nilai Indeks Unit Pelayanan dapat disimpulkan adalah :

a. Tingkat Kepuasan Masyarakat = Nilai Indeks X Nilai Dasar = $3,355 \times 25 = 83,87$

b. Mutu Pelayanan adalah **A**

c. Kinerja Unit Pelayanan **Sangat Baik**

**JUMLAH SAMPEL YANG DIUJI DENGAN
PARAMETER KRITIS
BBPOM DI DENPASAR
TAHUN 2015**

NO	KOMODITI	JUMLAH SAMPEL
(1)	(2)	(3)
1	Pangan	1050
2	Obat	700
3	Obat Tradisional	525
4	Kosmetik	1050
5	Suplemen Kesehatan	175
TOTAL		3500

**PEMENUHAN TARGET SAMPLING
PRODUK OBAT DI SEKTOR PUBLIK (IFK)
BBPOM DI DENPASAR
TAHUN 2015**

No	Nama Instalasi Kabupaten/Kota yang dilakukan Sampling	Jumlah Sampel	Realisasi	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	IFK Kabupaten Jembrana	25	25	100
2	IFK Kabupaten Buleleng	9	9	100
3	IFK Kabupaten Badung	15	15	100
4	UPT Pengawasan Farmasi dan Makanan Kota Denpasar	6	6	100
5	UPT Gudang Farmasi Kabupaten Bangli	20	20	100
	TOTAL	75	75	100

**PERSENTASE CAKUPAN PENGAWASAN
SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN
BBPOM DI DENPASAR
TAHUN 2015**

NO	JENIS SARANA	JUMLAH		%
		SARANA DI PROVINSI BALI	SARANA YANG DIPERIKSA	
1	Obat Tradisional	15	11	
2	Kosmetik	28	21	
3	Pangan	628	170	
TOTAL		671	202	30%

**PERSENTASE CAKUPAN PENGAWASAN
SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN
BBPOM DI DENPASAR
TAHUN 2015**

NO	JENIS SARANA	JUMLAH		%
		SARANA DI PROVINSI BALI	SARANA YANG DIPERIKSA	
1	Terapetik dan NAPZA	938	316	
2	Bahan Berbahaya	65	10	
3	Obat Tradisional	162	62	
4	Produk Komplemen	50	10	
5	Kosmetik	660	206	
6	Pangan	1306	268	
TOTAL		3181	872	27%

LAMPIRAN 5.6

**HASIL PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN KASUS TINDAK PIDANA DI BIDANG OBAT DAN MAKANAN
BBPOM DI DENPASAR
TAHUN 2015**

No	JENIS PRODUK	JUMLAH KASUS	TINDAK LANJUT			
			NON JUSTITIA	%	PRO JUSTITIA/PERKARA	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	OBAT	5	5	100,00	0	0,00
2	PANGAN	-	-	-	-	0,0
3	KOSMETIKA	12	8	66,67	4	33,33
4	OBAT TRADISIONAL	11	6	54,55	5	45,45
5	SUPLEMEN	-	-	-	-	-
TOTAL		28	19	67,9	9	32,1
NILAI BARANG BUKTI		Rp.666.161.900	Rp. 338.635.900		Rp. 327.526.000	

**JUMLAH LAYANAN PUBLIK
BBPOM DI DENPSAR
TAHUN 2015**

NO	LAYANAN	REALISASI			TARGET
		BULAN INI	JUMLAH SAMPAIBLN	TOTAL	
1	ULPK	76	1193	1269	1000
2	SKI/SKE	5	66	71	50
3	AUDIT REGISTRASI	5	38	43	30
4	PAMERAN	3	3	6	2
5	PENYEBARAN INFORMASI	0	13	13	13
6	KIE	2	12	14	10
7	MOBLING	7	38	45	40
8	UJI LAB PIHAK III	4	81	85	0
JUMLAH		102	1444	1546	1145

**KOMUNITAS YANG DIBERDAYAKAN
BBPOM DI DENPASAR
TAHUN 2015**

NO	KOMUNITAS
1	Pasar Agung
2	Pasar Sindhu
3	Pasar Intaran
4	Pasar Gianyar
5	Desa Takmung
6	Desa Kawasan
7	Desa Kusamba
8	Desa Penatih
9	Desa Pemecutan Kaja
10	Desa Sanur Kauh
11	Desa Peguyangan Kangin
12	Kelurahan Sumerta
13	Kelurahan Gianyar
14	Desa Batubulan
15	Desa Blahbatuh
16	Desa Sukawati
17	Desa Melinggih

**PEMENUHAN JUMLAH SARANA PRASARANA
BBPOM DI DENPASAR
TAHUN 2015**

No	Jenis	Persentase Pemenuhan
(1)	(2)	(3)
1	Meubelair dan Alat Pengolah Data	71,20%
2	Alat Laboratorium	80,89%
TOTAL PEMENUHAN		76,05%

**PROFIL JENIS UJI PROFISIENSI YANG DIKUTI DAN HASILNYA
BBPOM DI DENPASAR
TAHUN 2015**

NO.	JENIS UJI PROFISIENSI	PELAKSANA	BULAN PELAKSANAAN	HASIL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PK. Asam Benzoat dan Acesulfam-K dalam Minuman Ringan Secara HPLC	PPOMN	Mei	Inlier
2	PK. Pb dan Cd dalam AMDK secara AAS	PPOMN	Juni	Inlier
3	PK. Kafein dalam Kopi Bubuk dan Kopi Bubuk Dekafein secara HPLC	FAPAS	Agustus	Inlier
4	PK. Pb (Timbal) dan Cd (Kadmium) dalam Tepung Terigu secara AAS	APLAC	Agustus	Belum Ada Hasil
5	Uji <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i> dan <i>Candida albicans</i> pada kosmetik bentuk lotion	PPOMN	Mei	Inlier
6	Penetapan Kadar Diazepam dalam serbuk	PPOMN	Juli	Belum Ada Hasil
7	Penetapan Kadar Al(OH) ₃ dan Mg(OH) ₂ dalam tablet	PPOMN	Nopember	Belum Ada Hasil
8	Penetapan Kadar Oktil Metoksisinamat dalam Produk Kosmetik	PPOMN	September	Belum Ada Hasil
9	Identification and Determination of Hydroquinone in Cosmetic Product	Bureau of Cosmetics and Hazardous Substances Department of Medical Sciences Ministry of Public Health, Thailand	Juni	Memuaskan
10	Identifikasi BKO dalam Jamu Batuk Sediaan Cair	PPOMN	Juni	Belum Ada Hasil